



ISU LOKAL PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



EDWIN SETIADY, S.T., M.T.

KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN HIDUP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



DISAMPAIKAN PADA RAPAT PENDAHULUAN PENYUSUNAN KLHS
KRP PEMBANGUNAN PLTN, 16 SEPTEMBER 2025



PENDAHULUAN

PROFIL WILAYAH



Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Letak Geografis: 0°50' - 4°10' LS dan 104°50' - 109°30' BT

Luas Lautan : 4.254.947 ha

Luas Daratan :1.669.255,8
Wilayah administrasi:
7 Kabupaten/Kota

Jumlah Pulau: 577 Pulau

Batas Wilayah

Utara:

Laut Natuna

Timur:

Selat Karimata

Selatan:

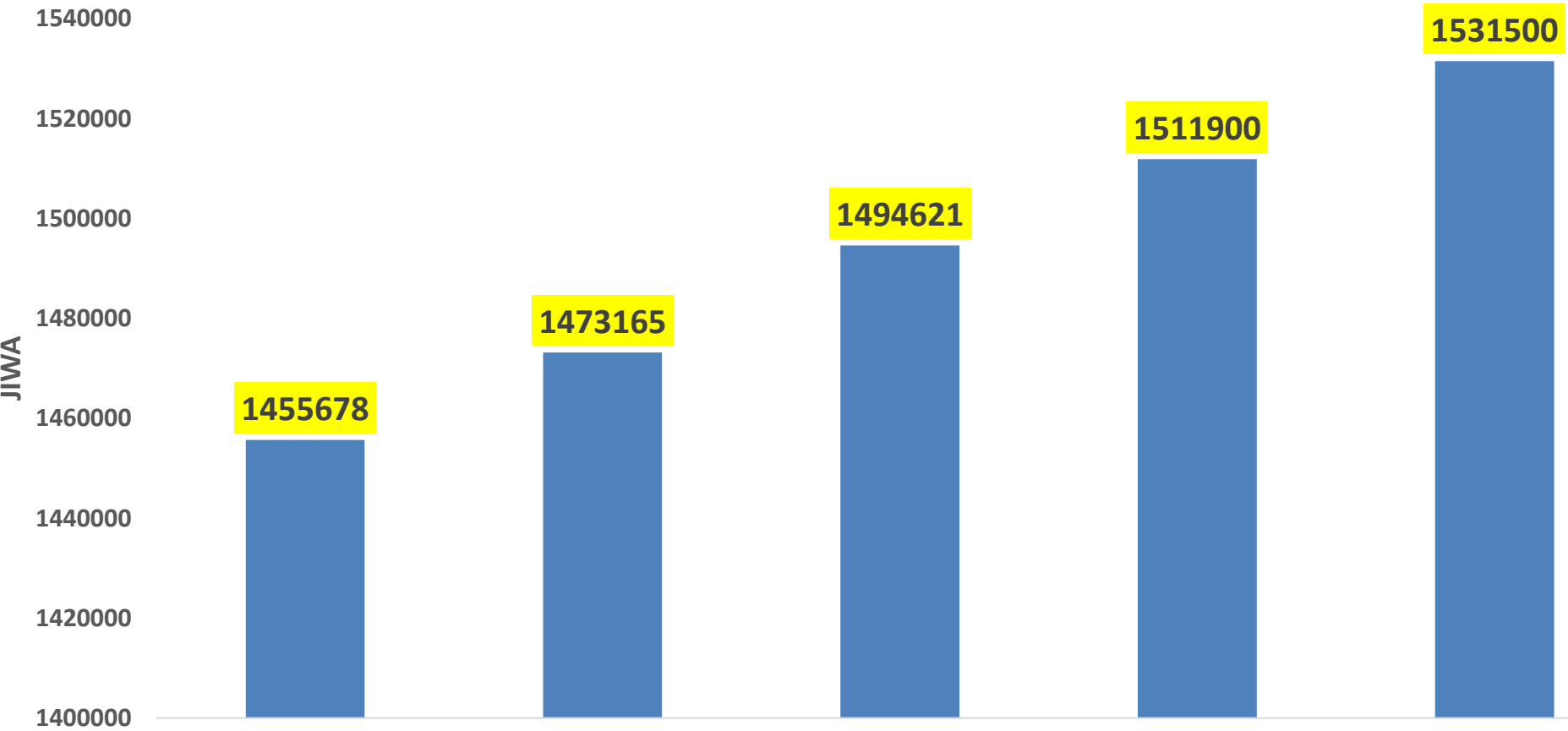
Laut Jawa

Barat:

Selat Bangka

No	Nama Kabupaten/Kota	Nama Ibu Kota	Luas (Km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	Sungailiat	3.0166,85	8	19	62
2	Bangka Barat	Muntok	2.851,41	6	4	60
3	Bangka Tengah	Koba	2.259,98	6	7	56
4	Bangka Selatan	Toboali	3.598,24	8	3	50
5	Belitung	Tanjung Pandan	2.270,70	5	7	42
6	Belitung Timur	Manggar	2.588,82	7	0	39
7	Pangkalpinang	Pangkalpinang	104,54	7	42	0
	Provinsi Kep. Bangka Belitung			47	82	309

JUMLAH PENDUDUK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



SEKTOR PEREKONOMIAN



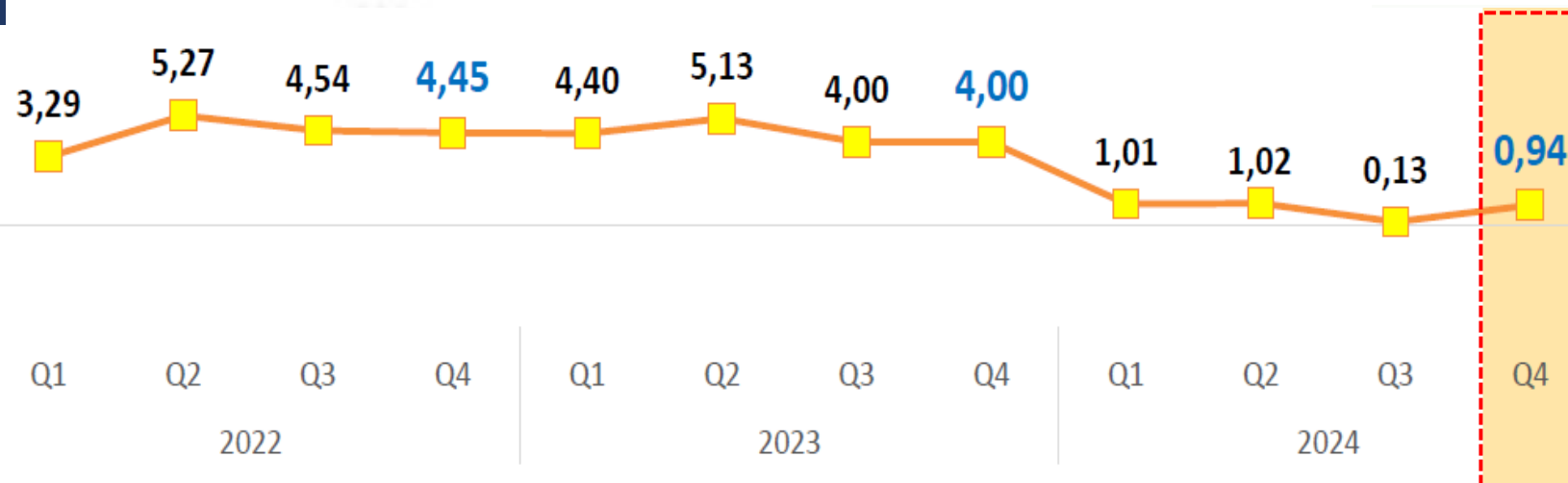
Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PERTUMBUHAN EKONOMI



LAJU PERTUMBUHAN PDRB TAHUN 2022-2024 Y-ON Y (PERSEN)



STRUKTUR PDRB DAN PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT LAPANGAN USAHA TW IV 2024 (Y-ON-Y): 0,94%

Struktur PDRB (%)		Pertumbuhan PDRB (%)	
[20,14]	21,25	Industri Pengolahan	[3,08] -0,03
[19,51]	20,37	Pertanian	2,95 [-1,26]
[16,42]	15,65	Perdagangan	[10,42] -1,22
[9,88]	9,34	Konstruksi	[11,47] -0,43
[7,70]	7,91	Pertambangan	1,98 [-1,28]
[5,24]	5,07	Adm. Pemerintahan	3,28 [-1,24]
[4,84]	4,42	Transportasi & Pergudangan	[6,42] -4,37
[3,32]	3,28	Real Estat	3,16 [3,78]
[3,14]	3,08	Akomodasi & Makan Minum	[2,48] 1,14
[2,79]	2,97	Jasa Pendidikan	9,98 [2,42]
[2,29]	2,20	Informasi & Komunikasi	1,93 [15,59]
[1,93]	1,79	Jasa Keuangan	[6,14] -2,76
[1,44]	1,37	Jasa Kesehatan	[9,87] -0,21
[0,91]	0,90	Jasa Lainnya	3,20 [13,39]
[0,31]	0,27	Jasa Perusahaan	[12,23] -7,94
[0,12]	0,11	Pengadaan Listrik	0,73 [21,63]
[0,02]	0,02	Pengadaan Air	0,21 [1,21]

(...) merupakan angka Triwulan IV 2023 (y-on-y)

DISTRIBUSI TERBESAR

- Industri Pengolahan (21,25 persen)
- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (20,37 persen)
- Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (15,65 persen)

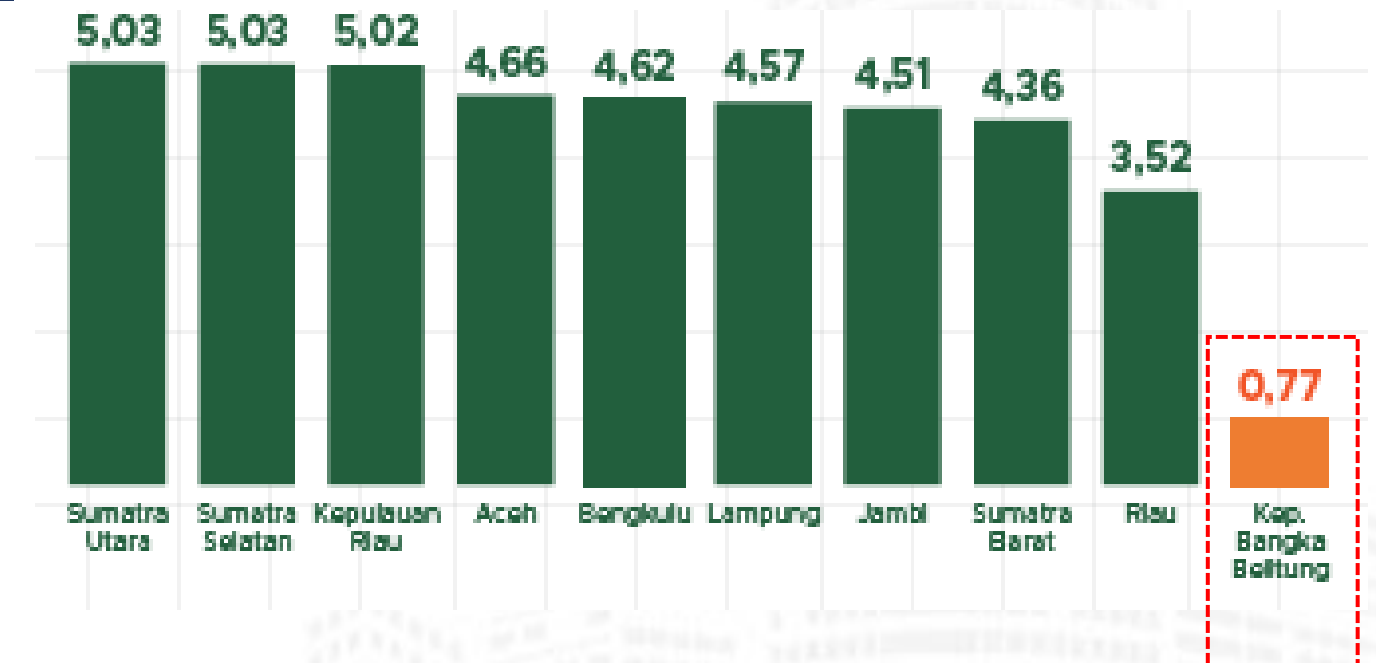
TRIWULAN IV-2024

- Industri Pengolahan sebagai kontributor utama berkontraksi sebesar 0,03 persen, sementara Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh sebesar 2,95 persen.
- Lebih banyak lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif dibanding yang berkontraksi.

PERTUMBUHAN TERBESAR

- Jasa Pendidikan (9,98 persen)
- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (3,28 persen)
- Jasa Lainnya (3,20 persen)

PERTUMBUHAN EKONOMI SE-SUMATERA 2024 (PERSEN)



KONTRIBUSI SE-SUMATERA 2024 (PERSEN)



Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan kontribusi terhadap perekonomian Sumatera sebesar **2,21 persen**

Sumber : BPS Provinsi Kep. Ba



bappeda.babelprov.go.id

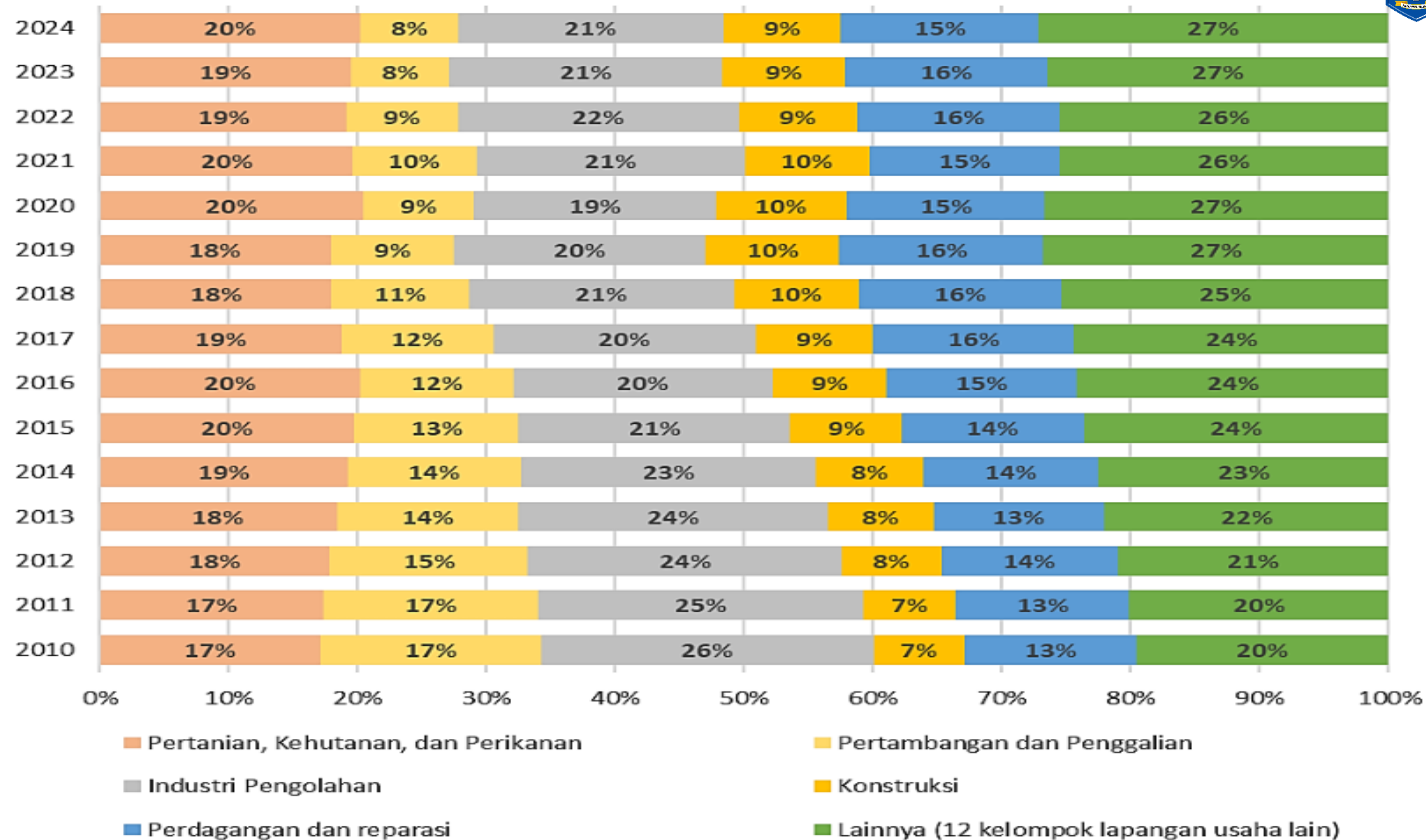


bappedababel

Struktur Ekonomi Utama (PDRB ADHB)



Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Struktur ekonomi utama di Babel berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku, menurut lapangan usaha:

1. Industri pengolahan (smelter, CPO)
2. Pertanian, perkebunan, perikanan
3. Perdagangan dan reparasi
4. Pertambangan dan penggalian
5. Konstruksi

VISI DAN MISI RPJPD 2025 - 2045



BERKELANJUTAN

Strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan



TRANSFORMASI

Transformasi adalah perubahan, berubah dari keadaan yang sebelumnya menjadi baru dan lebih baik dari aspek ekonomi, sosial maupun tata kelola pemerintahan



UNGGUL

Lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya) dari pada yang lain-lain, yaitu mewujudkan SDM yang berdaya saing tinggi dengan menguasai IPTEK dan berlandaskan IMTAQ



MAJU

Progresif dan transformatif untuk menghasilkan produk kebijakan yang berkualitas dalam tatar integritas dan profesional dalam layanan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan daerah (*good governance and society*)



HARMONIS

Keselarasan, keseimbangan atau keserasian dalam keberagaman

VISI RPJPD: BABEL “BERTUAH” 2045

MISI :

1. Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing
2. Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau
3. Transformasi Tata Kelola
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Daerah
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6. Pembangunan Kepulauan Bangka Belitung yang Merata dan Berkeadilan
7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

TAHAPAN I (2025 - 2029) : FONDASI PEMBANGUNAN

Penguatan SDM, ekonomi biru dan ekonomi hijau berbasis agromaritim yang tangguh, hilirisasi timah, serta inisiasi *community-based geo-ecotourism* dan ekonomi kreatif serta bioprospeksi, tata kelola pemerintahan yang mengedepankan supremasi hukum, keamanan, ketentraman dan pemenuhan sarana prasarana serta mempertahankan ketahanan sosial budaya dan ekologi dalam pembangunan dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan.

TEMA PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN



Gerbang Barat Bangka Belitung yang
mendedepankan industri, agrikultur,
pengembangan budaya dan geo
Heritage

Pengembangan agroindustri,
eco-tourism, dan Pusat
Pendidikan
dan Religi



MANDALA PENGEMBANGAN QUALITY TOURISM DAN EKONOMI BIRU

Didefinisikan sebagai pengembangan pariwisata yang berkualitas
Mengutamakan kelestarian lingkungan, kesejahteraan sosial budaya
Dan kesejahteraan masyarakat lokal

Quality Tourism, Ekonomi
Kreatif, Agromaritim dan Pulau-
pulau Kecil



FUNGSI KAWASAN HUTAN



Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

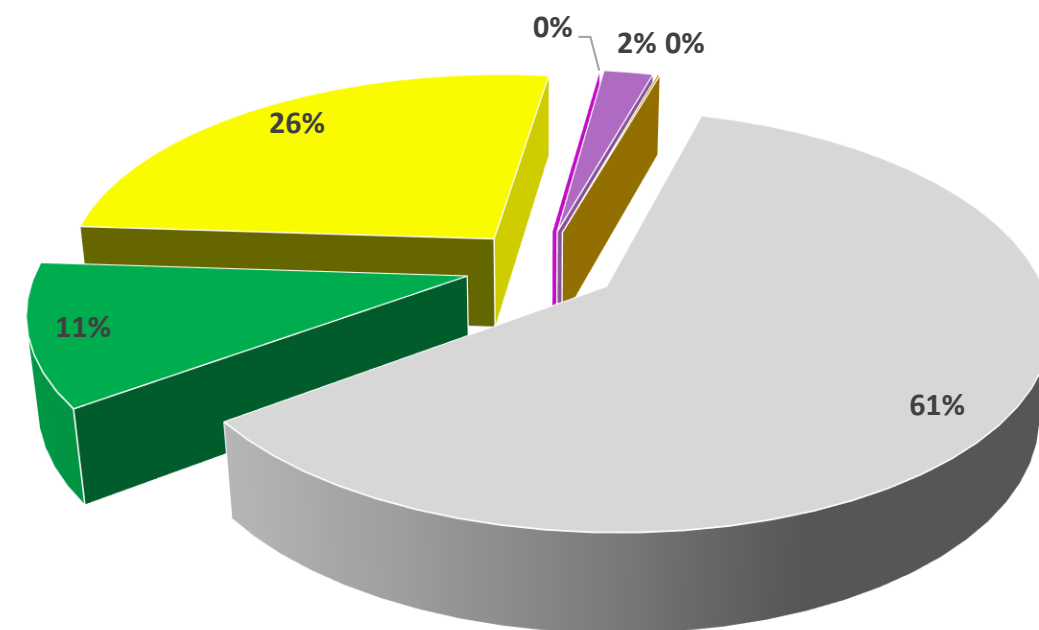
Nomor : SK.6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

TENTANG

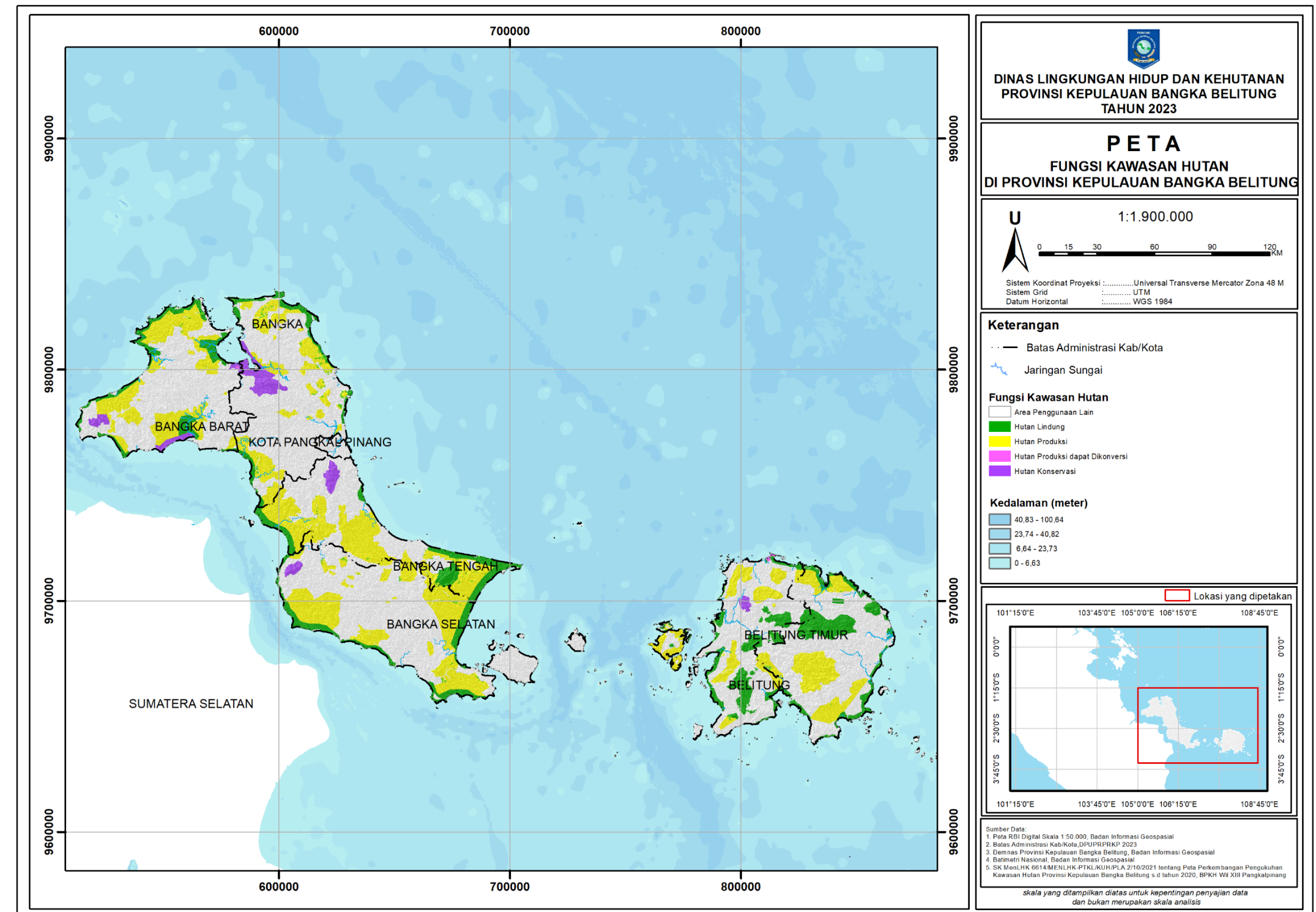
PETA PERKEMBANGAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SAMPAI DENGAN TAHUN 2020

Kawasan Hutan	Luas (ha)	%
APL	1.009.020	60,44
HL	186.426	11,17
HP	435.197	26,07
HPK	695	0,04
HK	36.354	2,18
TORA	1.767	0,11
Total	1.669.459	100

Persentase Luasan Kawasan Hutan



■ APL ■ HL ■ HP ■ HPK ■ HK ■ TORA





INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)

Untuk Memberikan Gambaran Secara Umum Atas Pencapaian Kinerja Program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



TUJUAN IKLH



Sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat pusat maupun daerah yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup



Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup



Sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup



Pencapaian IKLH

SECARA UMUM TERDAPAT TREN POSITIF PENCAPAIAN IKLH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024 NAIK DARI TAHUN 2023 DENGAN BERBAGAI UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

WALAUPUN TERDAPAT TREN KENAIKAN , INDEKS KUALITAS LAHAN DAN INDEKS KUALITAS AIR MASIH MENJADI FOKUS YANG HARUS DILAKUKAN PERBAIKAN KEDEPAN

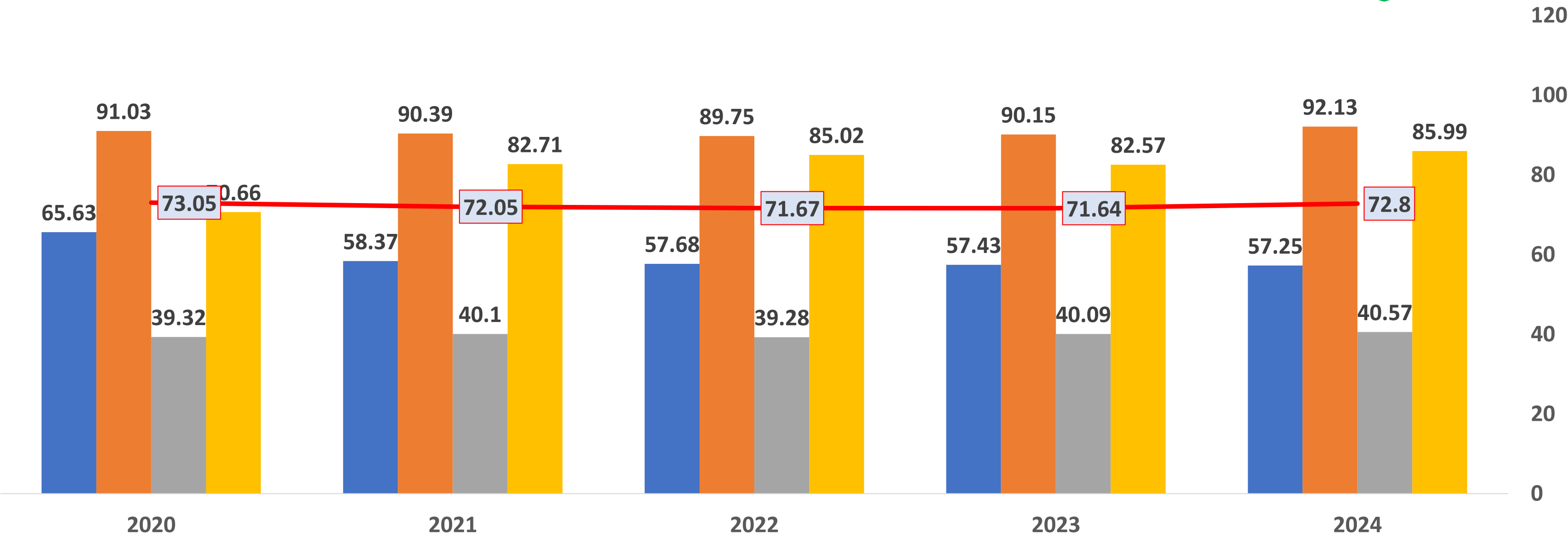


INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

TREND IKLH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020-2024

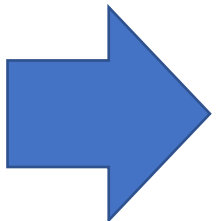
IKLH TAHUN 2024 MASIH
DALAM KATEGORI BAIK

■ IKA ■ IKU ■ IKL ■ IKAL — IKLH



KETERANGAN:
IKLH : INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
IKA : INDEKS KUALITAS AIR
IKU : INDEKS KUALITAS UDARA
IKL: INDEKS KUALITAS LAHAN
IKAL : INDEKS KUALITAS AIR LAUT

DIBANDINGKAN
TAHUN 2023
PENCAPAIAN IKLH
TAHUN 2024



IKL= NAIK 0,48 POIN
IKU= NAIK 1,98 POIN
IKA = TURUN -0.18 POIN
IKAL = TURUN 3,42 POIN
IKLH = NAIK 1,15 POIN



ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (PB)

ISU BERDASARKAN DOKUMEN KLHS DAN PERENCANAAN LAINNYA



No.	KLHS Food Estate	No.	KLHS RTRW 2024-2044	No.	KLHS RPJPD 2025-2045
1	Kerusakan lahan	1	Kerusakan ekosistem pesisir dan laut	1	Kerusakan ekosistem daratan
2	Keberlanjutan sumber daya hutan	2	Penurunan kuantitas & kualitas air	2	Kerusakan ekosistem pesisir dan laut
3	Kebakaran hutan dan lahan	3	Masalah keberlanjutan pengelolaan lahan bekas tambang	3	Belum optimalnya transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas berbasis lingkungan yang berkelanjutan
4	Perubahan kualitas air permukaan	4	Akumulasi sampah yang tidak terkelola	4	Rendahnya SDM yang berdaya saing
5	Kerusakan ekosistem pesisir dan laut			5	Penurunan kuantitas dan kualitas air
6	Keberlanjutan penghidupan masyarakat				



No.	Dokumen IKPLHD 2023	No.	Dokumen RPPLH	No.	KLHS RZWP3K	No.	KLHS P-RPJMD 2017-2022
1	Belum optimalnya pengelolaan sampah,	1	Ahli Fungsi Lahan	1	Perubahan iklim	1	Ketersediaan air bersih yang terbatas
2	Kerusakan pesisir dan laut,	2	Penurunan Kualitas Air Dan Kuantitas Air	2	Rawan bencana alam	2	Pengelolaan sampah dan limbah yang masih kurang optimal
3	Belum optimalnya tata kelola dan manajemen lingkungan hidup,	3	Kerusakan Laut Dan Pesisir	3	Maraknya penambangan timah di laut	3	Kerusakan lahan
4	Eksplorasi dan alih fungsi lahan,	4	Emisi GRK dan Perubahan Iklim	4	Pencemaran perairan/penurunan kualitas air	4	Pengendalian pertambangan timah yang masih kurang
5	Penurunan kualitas air.	5	Pengelolaan Sampah Dan Limbah	5	Illegal/destructive fishing	5	Kerusakan laut dan pesisir
		6	Ketahanan Pangan	6	Kerusakan fisik lingkungan laut	6	Banjir
		7	Perlindungan Keanekaragaman Hayati	7	Kerusakan terumbu karang secara masif	7	Kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda
				8	Pendangkalan DAS/muara sungai	8	Kurangnya kualitas kesehatan masyarakat
				9	Konflik pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut	9	Konflik sengketa lahan dan pemanfaatan ruang
						10	Banyaknya lahan tidak produktif

ISU PALING STRATEGIS KLHS RPJMD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025-2029



1



PENURUNAN KUANTITAS
DAN KUALITAS AIR

2



KERUSAKAN LAHAN

3



KETAHANAN PANGAN YANG RENDAH

4



TRANSFORMASI EKONOMI BELUM
OPTIMAL

5



PENGELOLAAN SAMPAH
BELUM OPTIMAL

6



EMISI GRK DAN PERUBAHAN IKLIM

7



KERUSAKAN PESISIR DAN LAUT

8



REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG
BELUM OPTIMAL

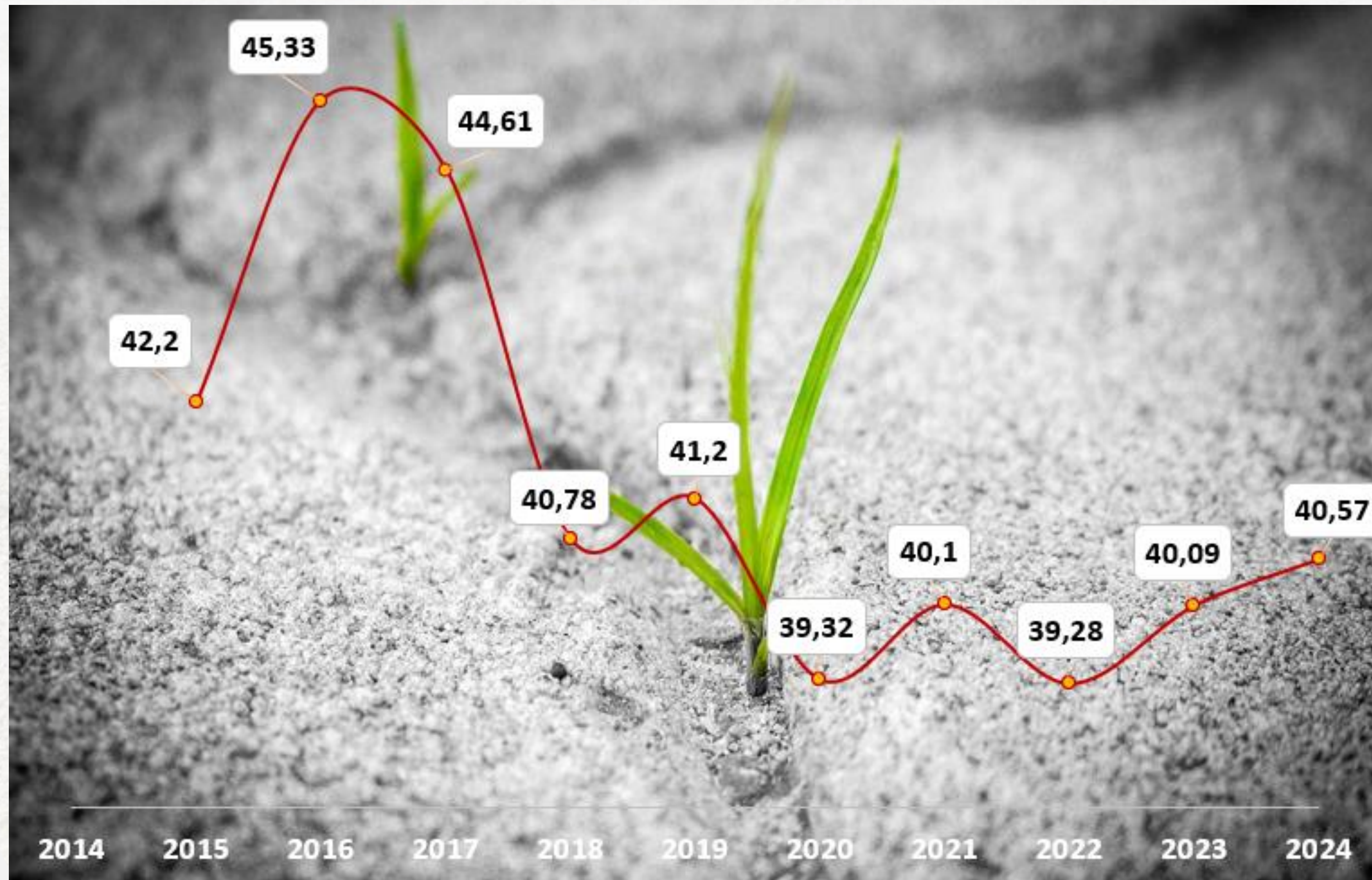


BASE LINE ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (PB)

TREND INDEKS KUALITAS LAHAN



Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



KONTRIBUSI PERHITUNGAN NILAI IKL TAHUN 2024

Tren Peningkatan

PL Hutan
28.777,8 ha

Tren Peningkatan di 5 kab, kecuali di Kab Bateng dan Kota Pangkalpinang mengalami penurunan luasan

Taman Kehati
7,75 ha

Target IKL 2025
40,92

Nilai IKL 2024
40,57

+ 0,48 poin

Nilai IKL 2023
40,09

Tren Penurunan

Belukar dalam Kawasan Hutan 1.891,8 ha
Kecuali di Kab Bateng & Pangkalpinang mengalami peningkatan

Belukar dalam Fungsi Lindung 239,6 ha
Kecuali di Kab Baeltim & Pangkalpinang mengalami peningkatan

Kebun Raya dan RTH
1200,84 ha

Vegetasi Relevan Lainnya
1.425 ha

RHL
1.045 ha

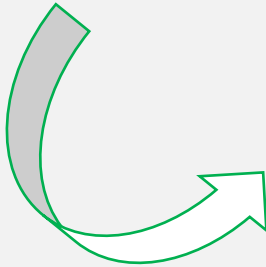
SKOR	KRITERIA
$90 \leq x \leq 100$	SANGAT BAIK
$70 \leq x < 90$	BAIK
$50 \leq x < 70$	SEDANG
$25 \leq x < 50$	KURANG
$0 \leq x < 25$	SANGAT KURANG

catatan: untuk meningkatkan nilai IKL sesuai target di Tahun 2025, berdasarkan rumus di PermenLHK 27/2021 maka diperlukan intervensi luasan RTH atau RHL seluas ± 25.000 ha atau peningkatan luasan Penutup Lahan Hutan ± 15.000 ha

ALIH FUNGSI LAHAN

Terhadap Tata Ruang

Porsi luasan
kawasan lindung &
budidaya RTRW

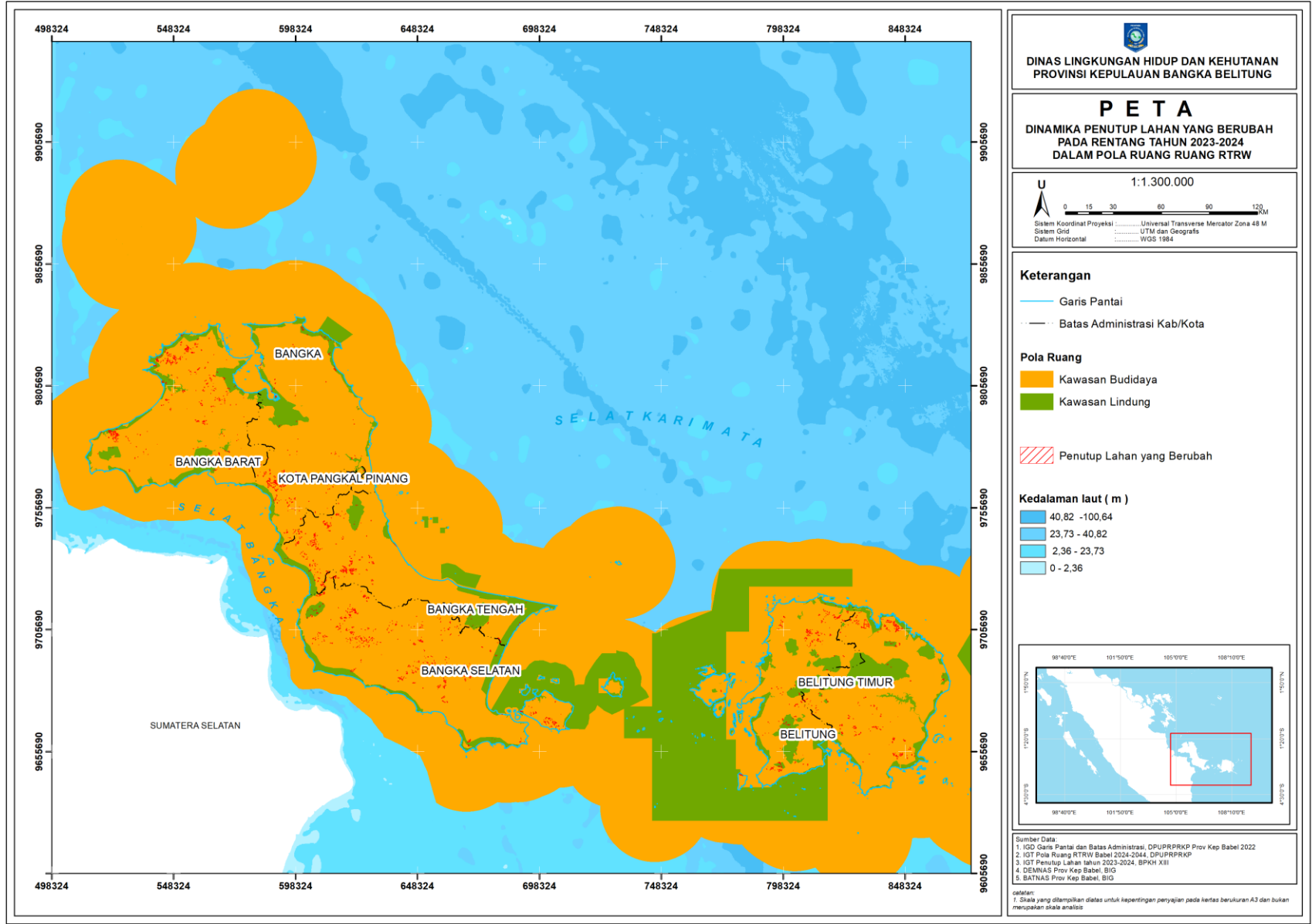


Perubahan Penutup Lahan Tahun 2023-2024 dalam Pola Ruang RTRW Prov
Kep Babel Tahun 2024-2044

B Kwsn Lindung:
1.243 ha (0,5 %)
Kwsn Budidaya:
62.314 ha (4,2 %)
erubah

T Kwsn Lindung:
244.318 ha (99,5 %)
Kwsn Budidaya:
1.415.784 ha (95,8%)
etap

Sebaran Penutup Lahan yang Mengalami Perubahan Tahun 2023-2024
terhadap Pola Ruang RTRW

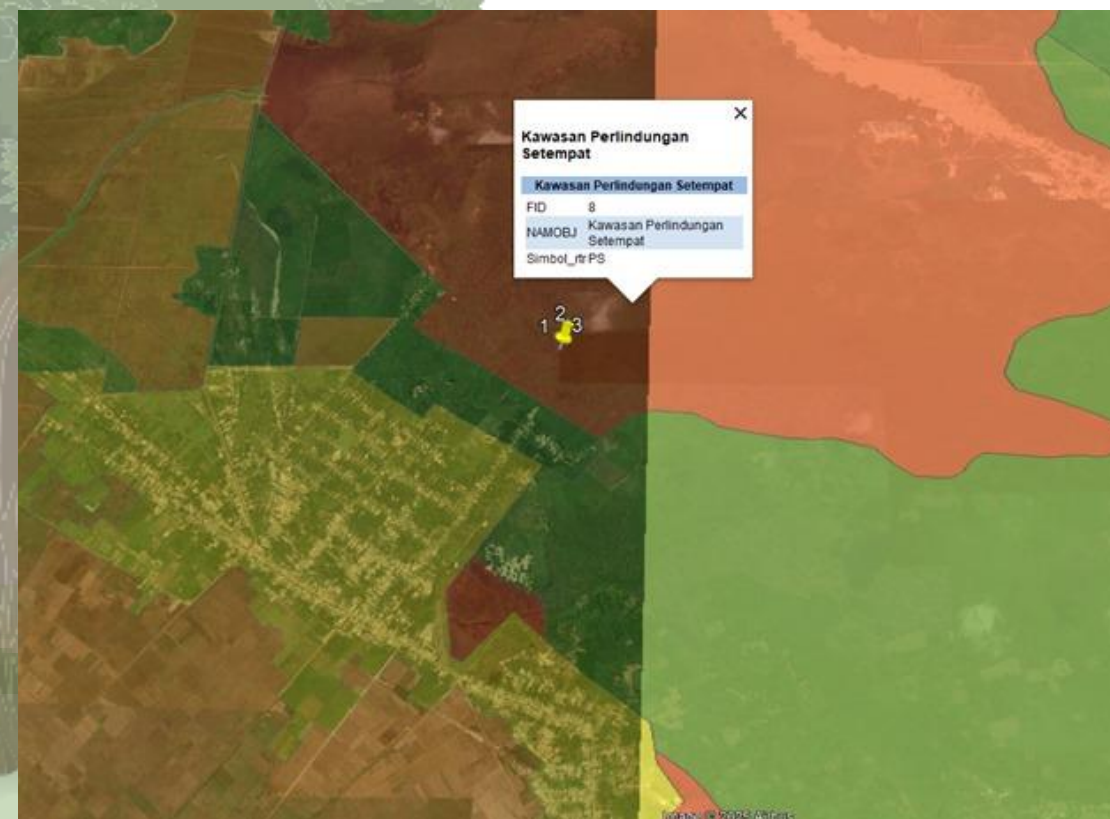
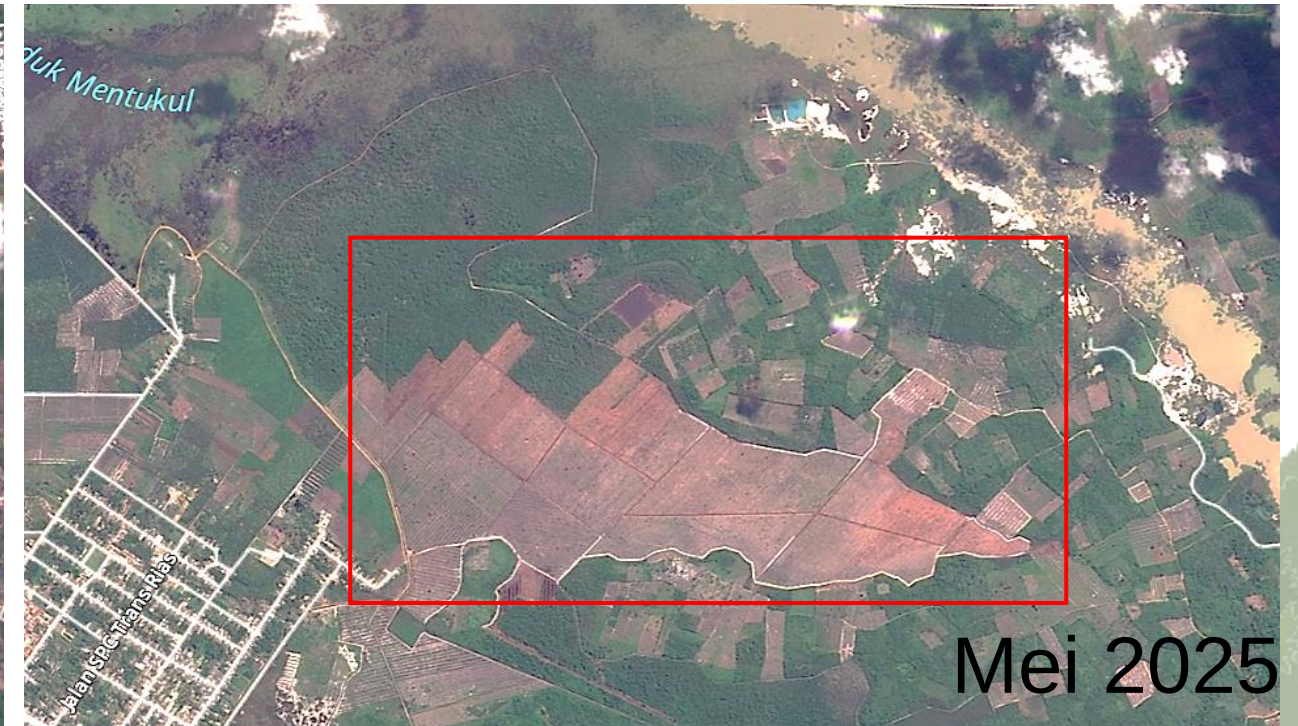
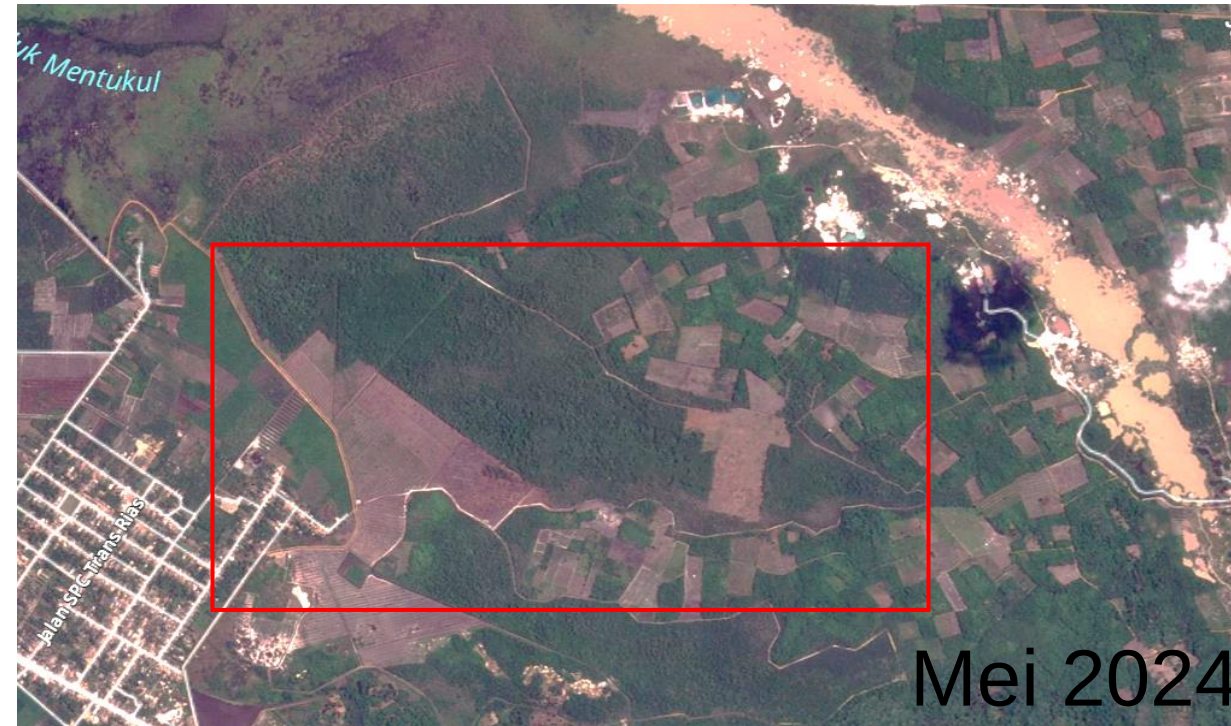
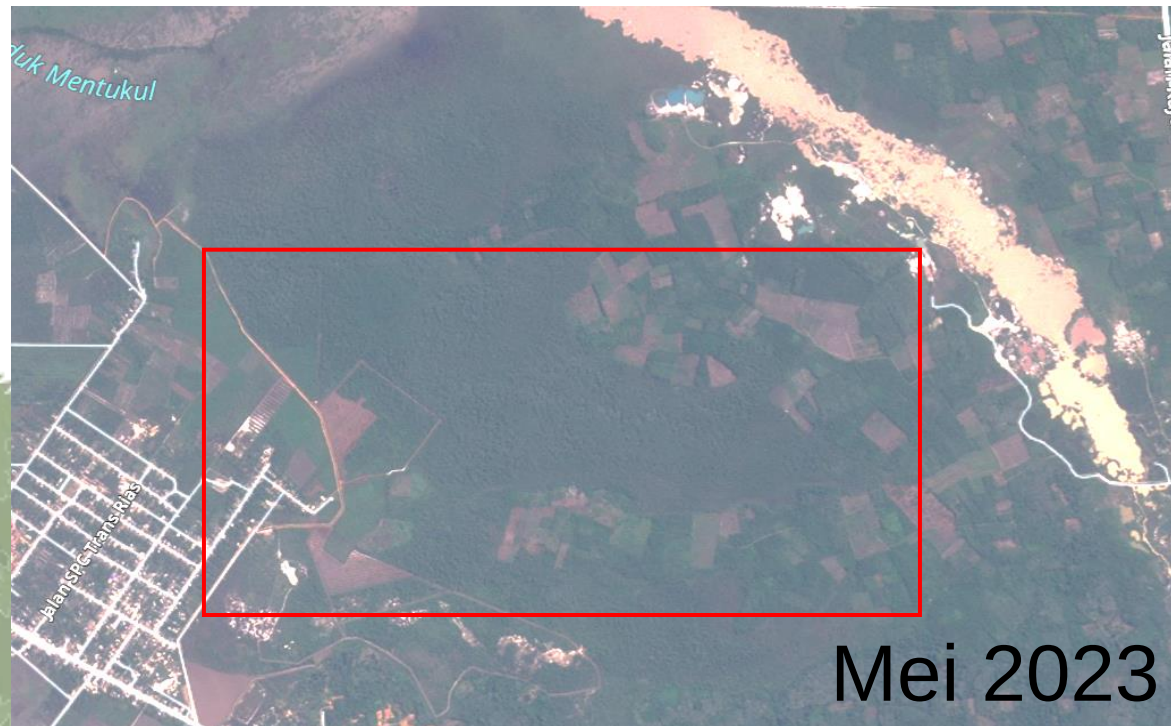


Sepanjang tahun 2023 hingga 2024 penutup lahan yang paling banyak mengalami perubahan di dalam kawasan lindung yaitu hutan sekunder dengan luas perubahan mencapai 571 hektar

Pada kawasan budidaya, sepanjang perubahan sepanjang tahun 2023-2024 perubahan juga didominasi oleh kelas hutan, khususnya hutan sekunder, hutan rawa sekunder, hutan mangrove primer dan sekunder dengan total luasan mencapai 8.642 hektar

ALIH FUNGSI LAHAN

Pembukaan Lahan Perkebunan di Kabupaten Bangka Selatan



Analisis Tumpang susun lokasi dengan matek revisi RTRW Kabupaten Bangka Selatan, lokasi berada di dalam pola ruang **Kawasan Perlindungan Setempat**



Analisis Tumpang susun lokasi dengan matek revisi RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, lokasi berada di dalam pola ruang **Kawasan Pertanian** dan **tidak berada dalam Ketetapan Khusus diantaranya Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

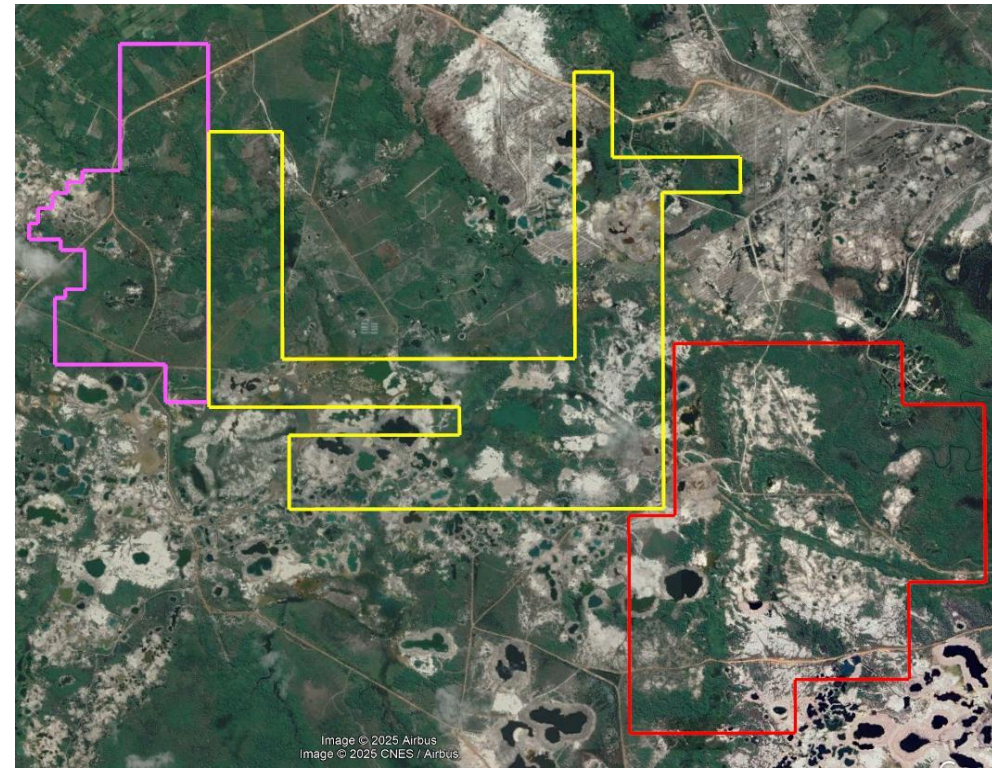
Indikasi Arahon Zonasi Di Pola Ruang Kawasan Pertanian RTRW Provinsi

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
- alih fungsi KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B atau lahan sawah yang dilindungi;
 - alih fungsi kawasan hortikultura yang ditetapkan sebagai hak indikasi geografis dan kawasan perkebunan yang ditetapkan sebagai Wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik;
 - kegiatan perkebunan di kawasan perlindungan setempat pada sempadan sungai bertanggung, kegiatan peternakan di kawasan cagar budaya dan kawasan ekosistem mangrove, serta kegiatan menggembala ternak di kawasan sekitar danau atau waduk;
 - kegiatan yang merusak jaringan irigasi dan prasarana **kawasan pertanian**, mengurangi kesuburan tanah, merusak lahan, membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;
 - kegiatan menebang, perusakan atau penghilangan pohon induk yang mengandung bahan perbanyakan sumber daya genetik; dan
 - kegiatan lain yang mengganggu dan mengubah fungsi **kawasan pertanian**;

Visualisasi Pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Tambang Kaolin Di Belitung



Tambang Timah Di Kabupaten Bangka Tengah



KONFLIK TAMBANG LAUT DENGAN NELAYAN
BERIGA KAB.BANGKA TENGAH



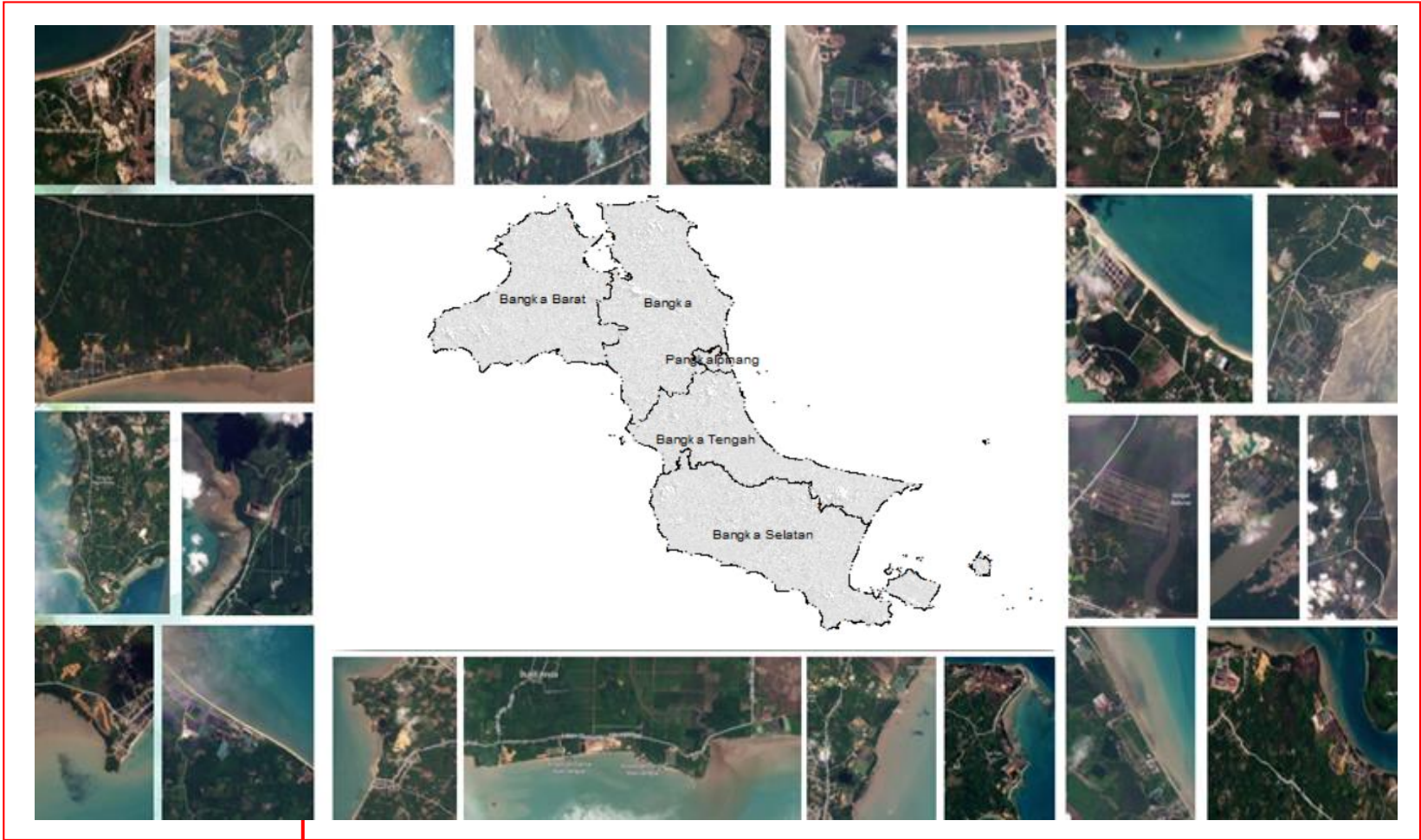
PEKERJA ANAK DAN PEREMPUAN DI TAMBANG
(Bangka Tengah)

Ketergantungan pada Timah:

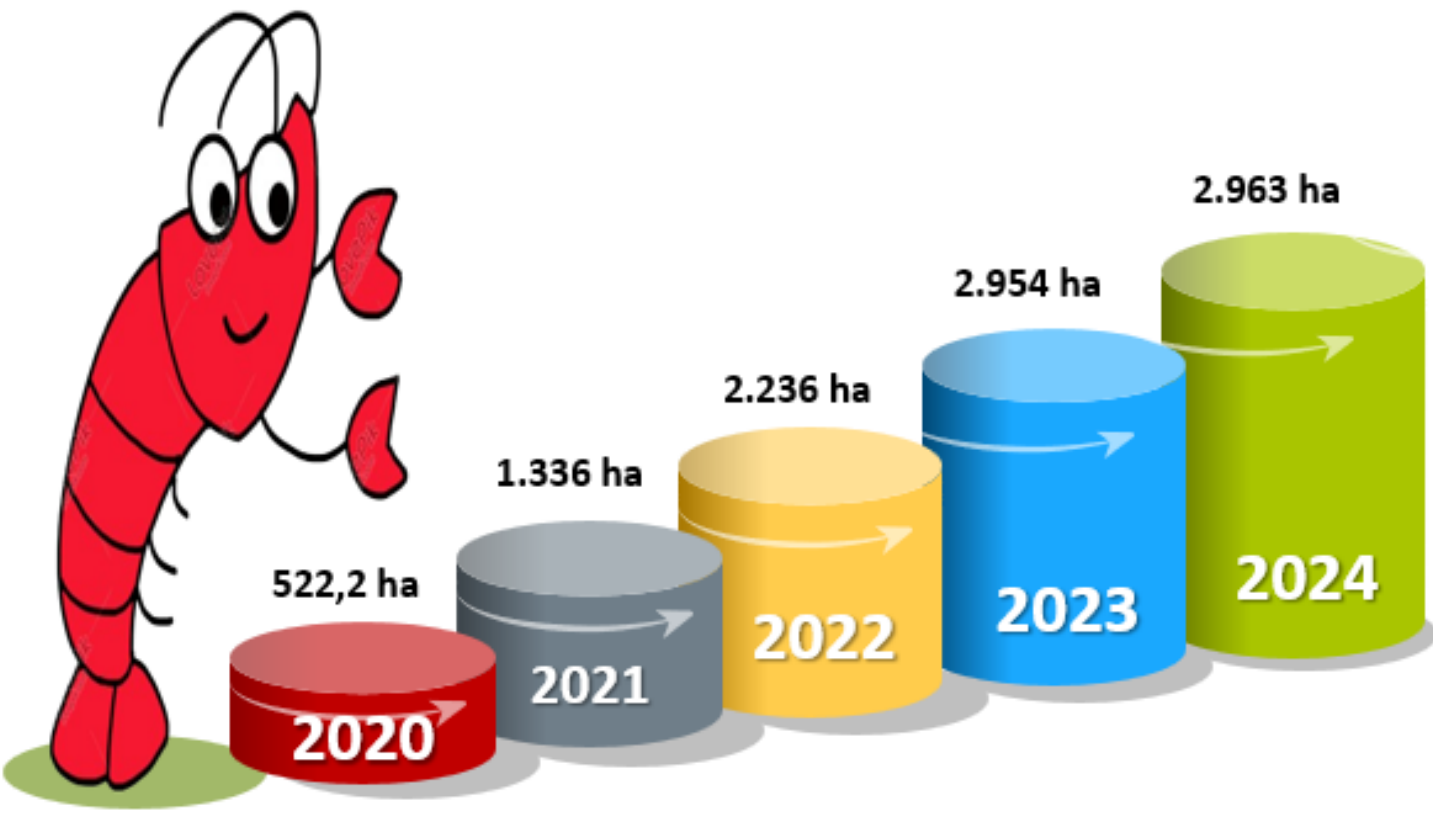
- Kerusakan lahan & ekosistem.
- Ketidakstabilan ekonomi akibat fluktuasi harga timah.
- Maraknya tambang ilegal & kurangnya Keberhasilan reklamasi .

ALIH FUNGSI LAHAN

MENJADI TAMBAK UDANG VANAME



Kegiatan Budidaya udang vaname yang merambah hingga sempadan pantai



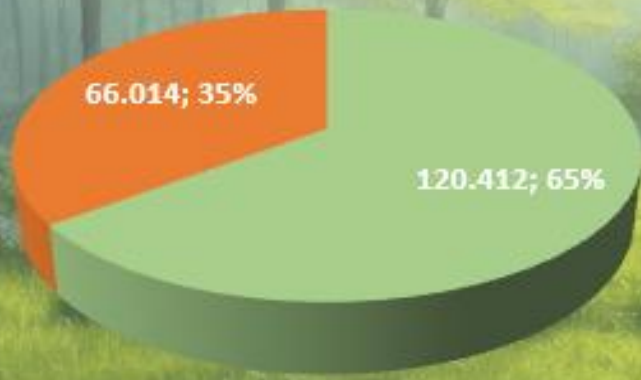
Trend Peningkatan Luasan Tambak Tahun 2020-2024

ALIH FUNGSI LAHAN

Terhadap Kawasan Hutan

Persentase Kesesuaian Penutup Lahan Tahun 2024 dalam Fungsi Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Konservasi

Fungsi Hutan Lindung



■ sesuai ■ tak sesuai

Fungsi Hutan Konservasi



■ sesuai ■ tak sesuai

Luasan perkebunan sawit dalam Fungsi kawasan hutan

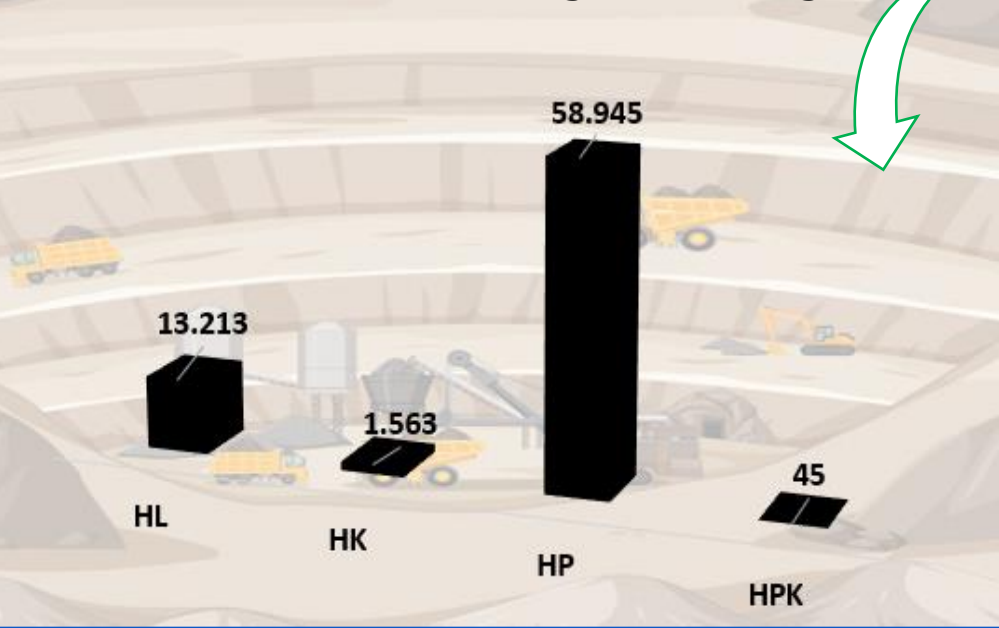


28.469 ha >> hutan produksi
6.597 ha >> hutan lindung
394 ha >> hutan konservasi

Eksisting perkebunan sawit dalam hutan lindung



Pertambangan Tahun 2024 dalam Fungsi Kawasan Hutan di Bangka Belitung



- ❑ Pertambangan yang berada di dalam fungsi kawasan hutan berpotensi untuk menurunkan kualitas lahan
- ❑ Luasan di atas belum memperhitungkan perizinan berkenaan pinjam pakai kawasan hutan terhadap kegiatan tertentu



2016



2022

Pertambangan dalam Kawasan Hutan Lindung di Pesisir Teluk Kelabat Dalam, Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2022

Sumber: Citra Sentinel 2A RGB 832 tahun 2016 dan 2022 – ESA Copernicus

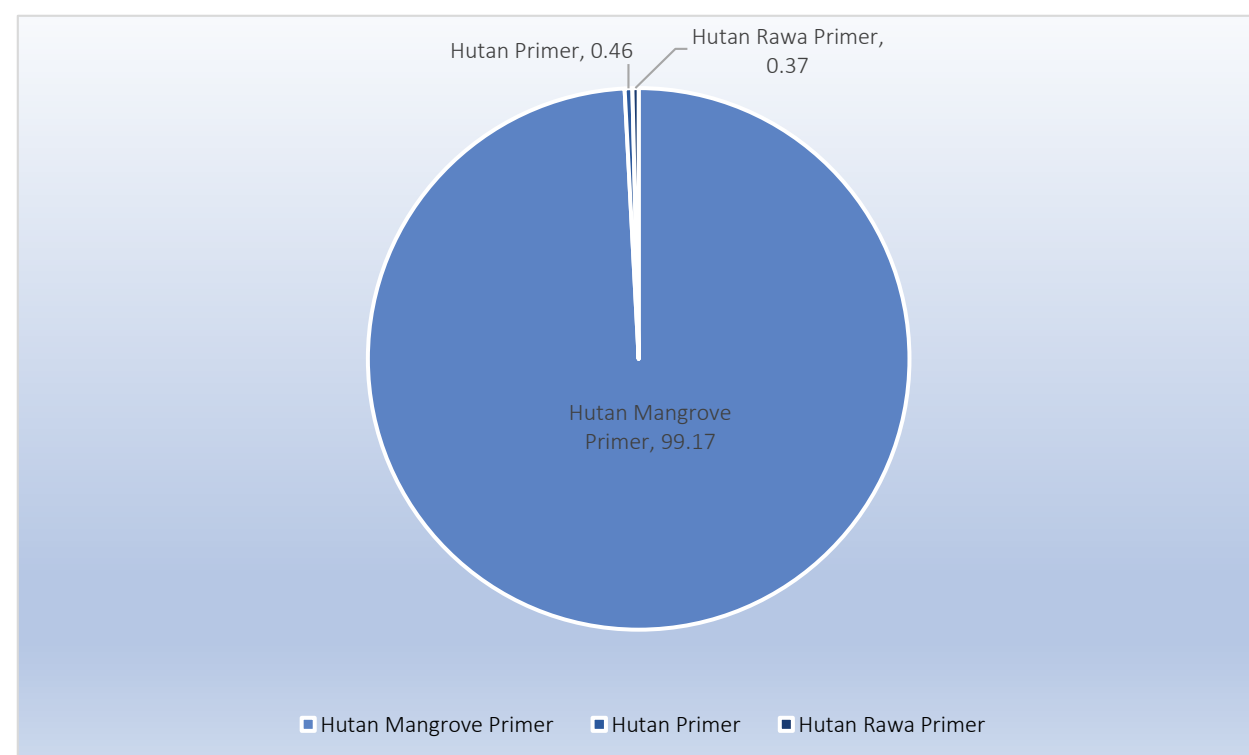
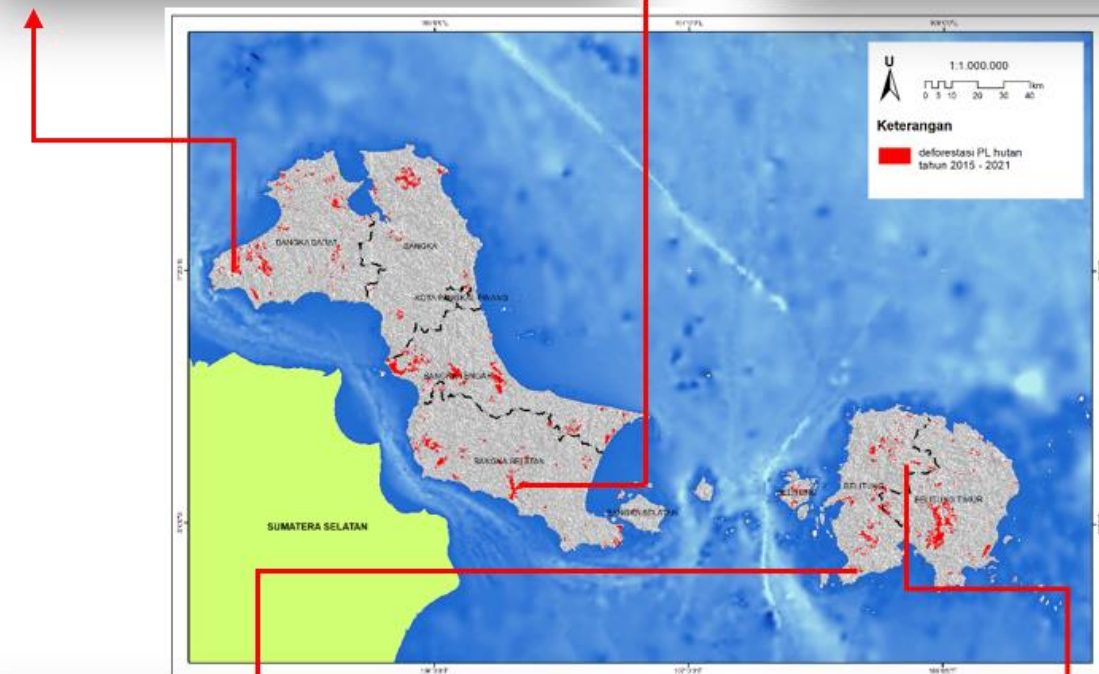


Eksisting aktivitas tambang dalam hutan lindung

DEFORESTASI & DEGRADASI HUTAN



Persebaran Deforestasi Hutan Antara Tahun 2015 - 2021

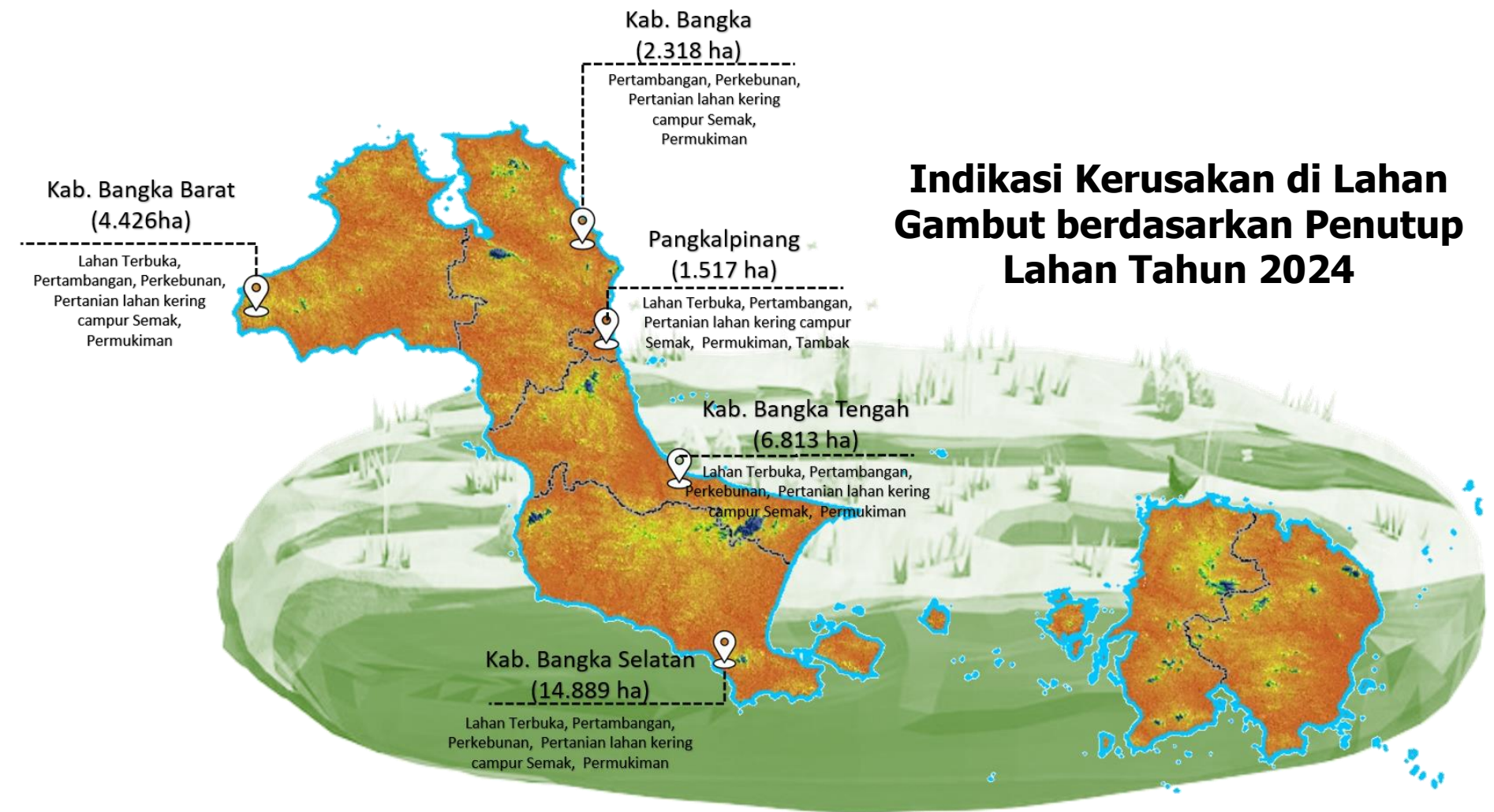
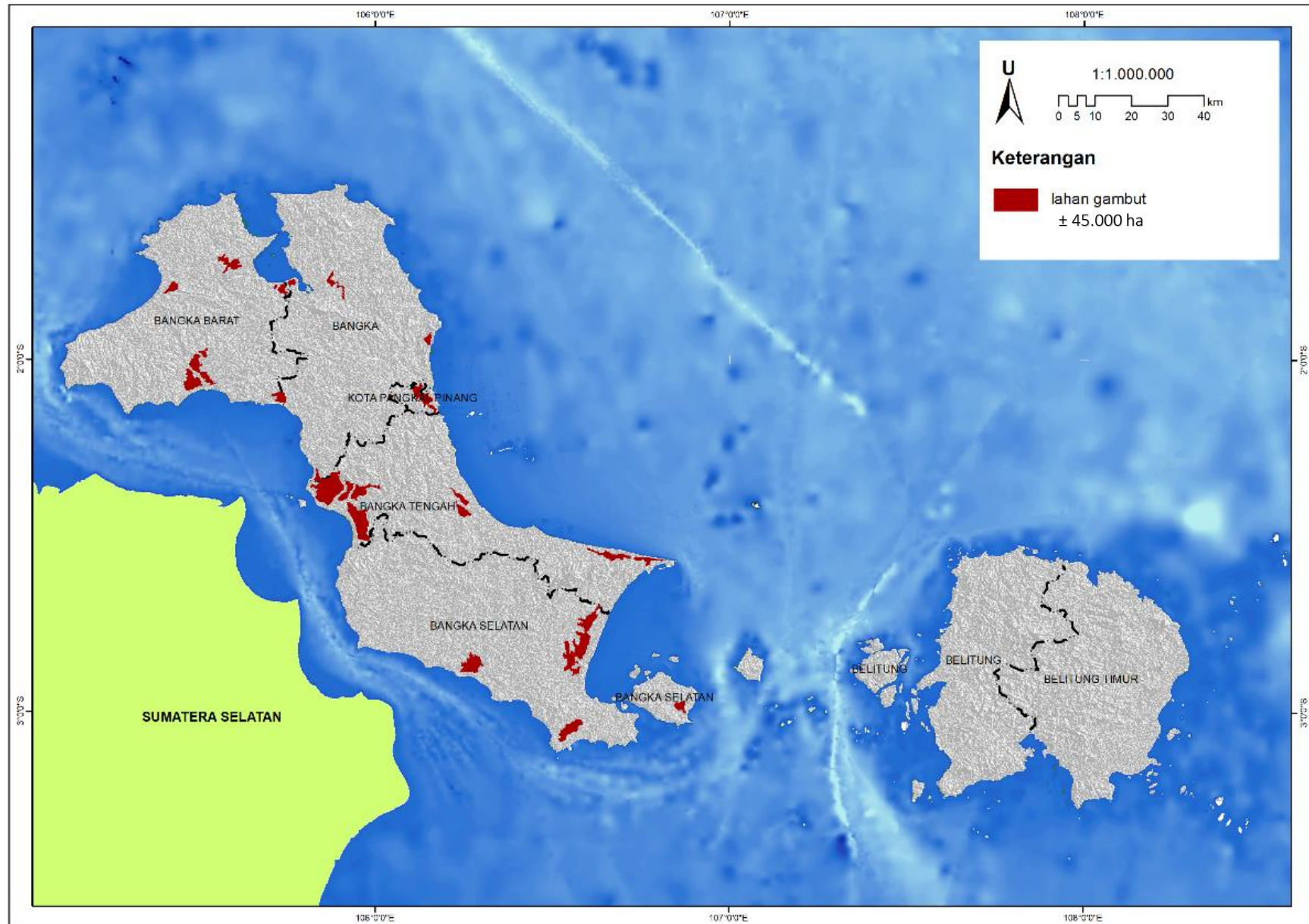


Persentase luasan penutup lahan hutan yang mengalami degradasi

ALIH FUNGSI LAHAN

Terhadap Lahan Gambut

Sebaran Lahan Gambut Di Bangka Belitung

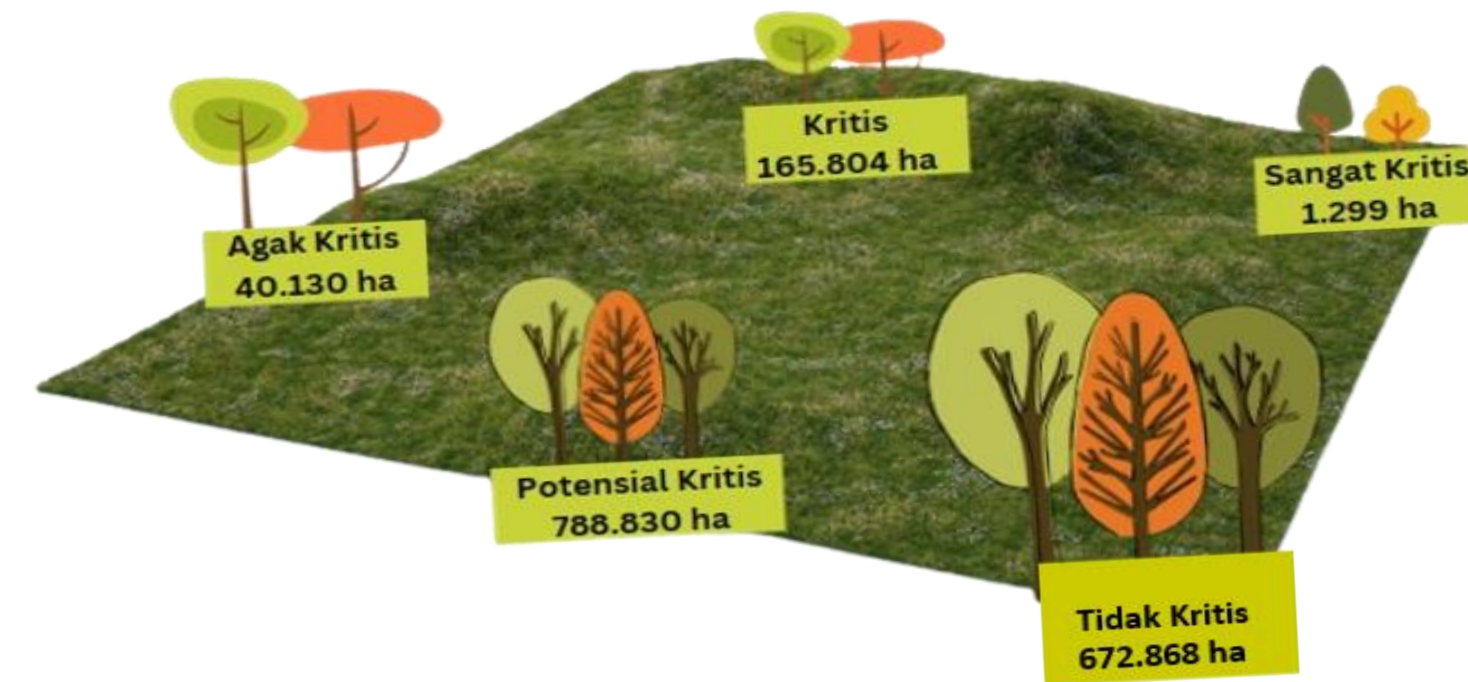
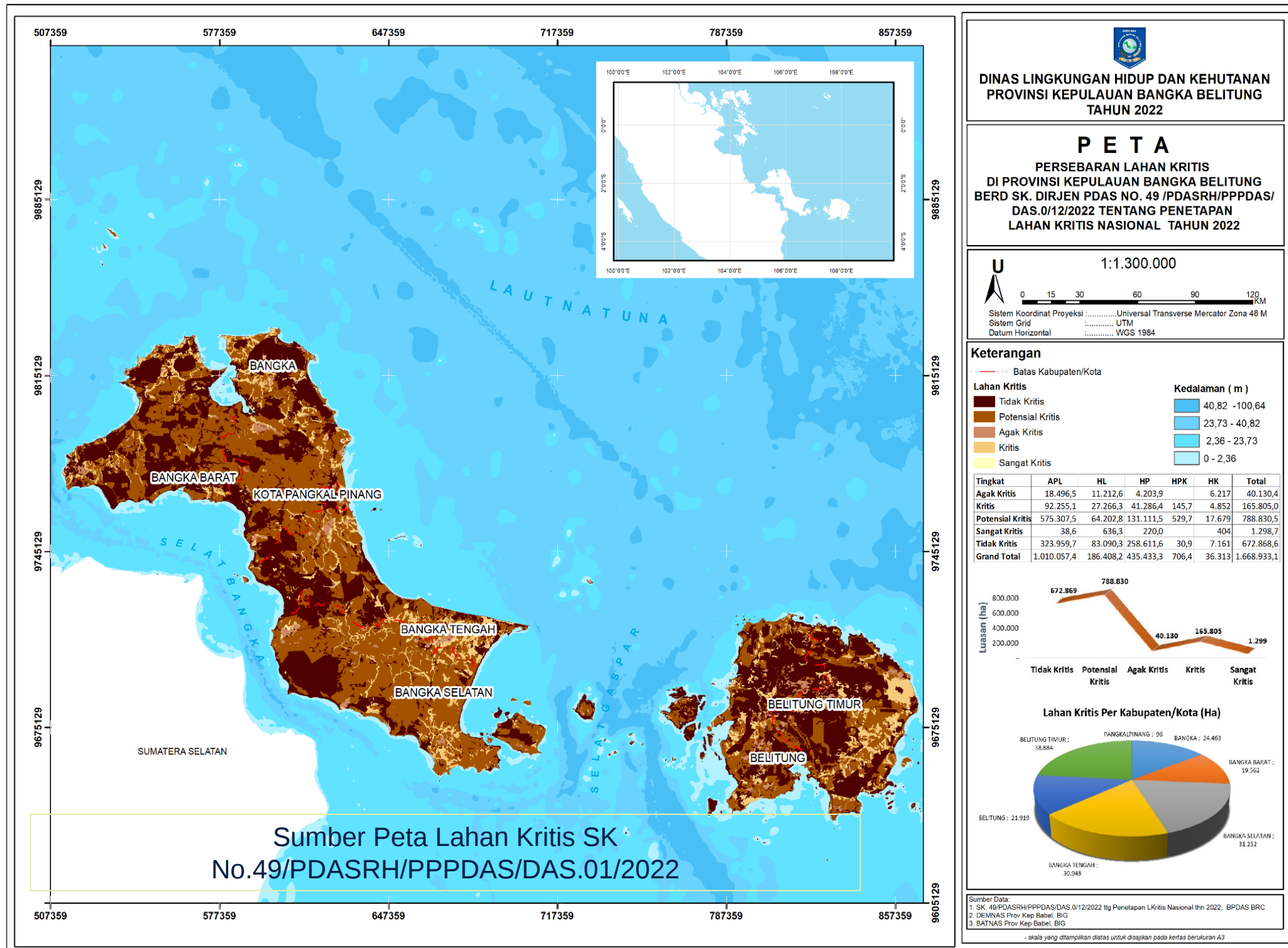


Indikasi Kerusakan di Lahan Gambut berdasarkan Penutup Lahan Tahun 2024



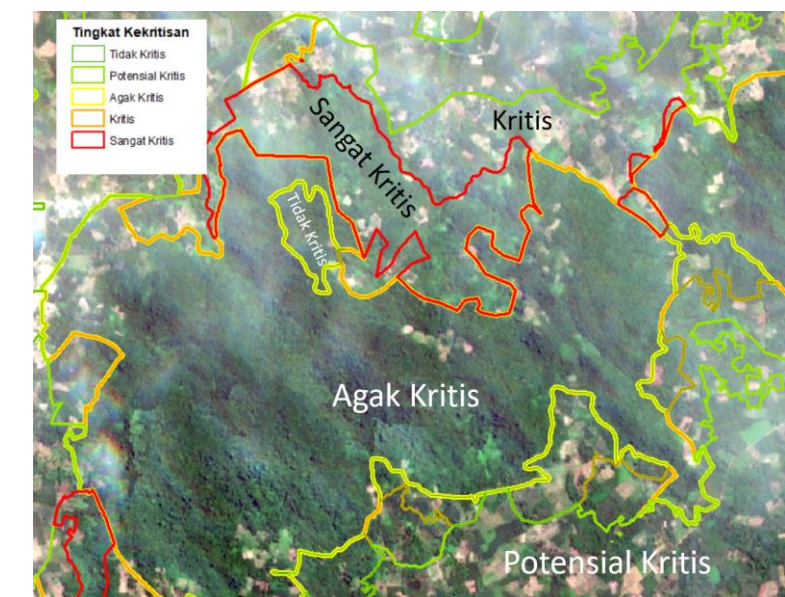
aktivitas perkebunan di lahan gambut di Kabupaten Bangka Selatan

LAHAN KRITIS



LAHAN KRITIS:
 APL : 92.255 HA
 HL : 27.266 HA
 HP : 41.286 HA
 HPK : 146 HA
 HK : 4.852 HA

LAHAN SANGAT KRITIS:
 APL : 39 HA
 HL : 636 HA
 HP : 220 HA
 HK : 404 HA

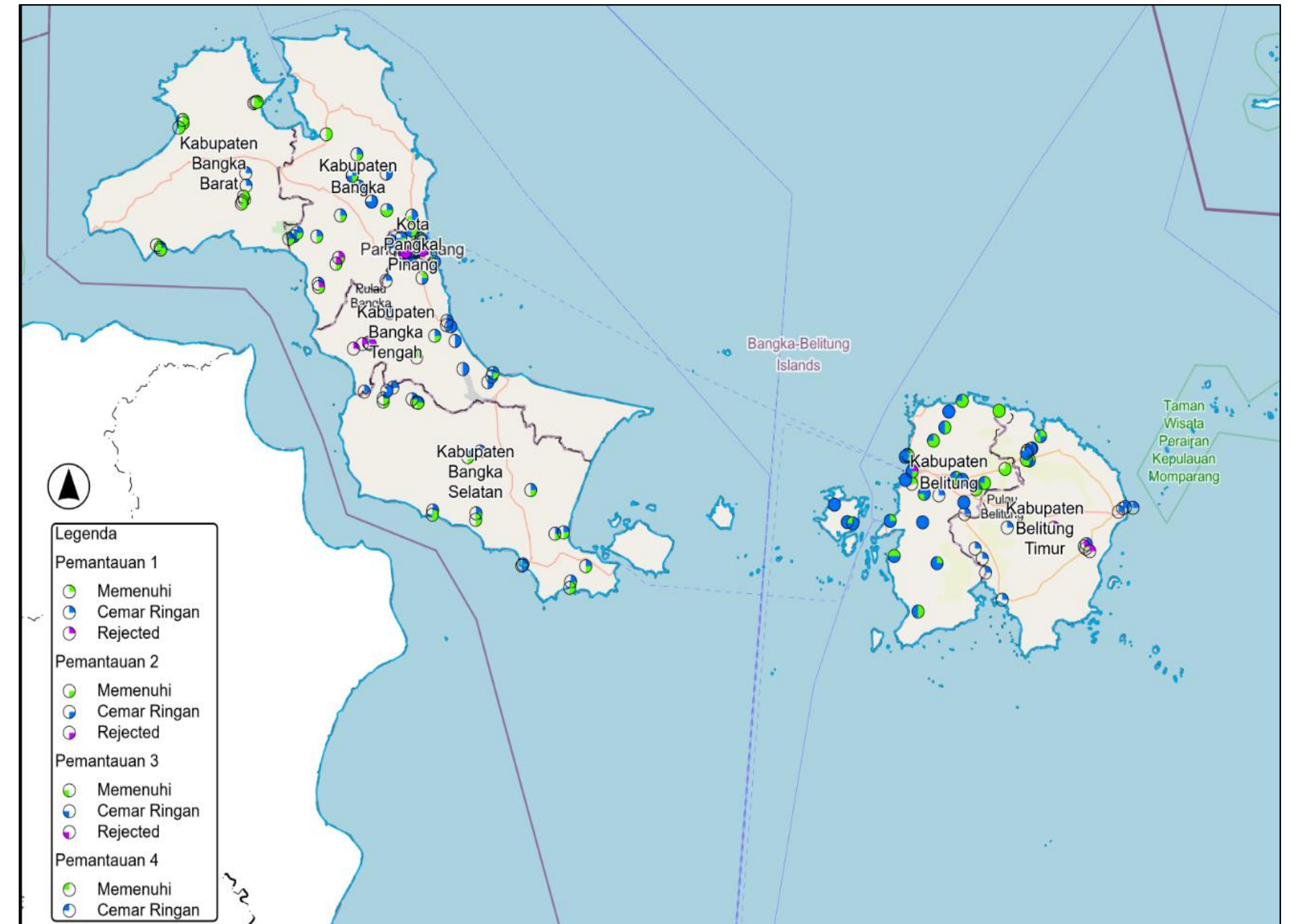


Lahan Kritis di TWA
Bukit Permisan

**LAHAN KRITIS DAN SANGAT KRITIS
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG = 167.065 Hektar**

KETERANGAN:
 APL : AREA PENGGUNAAN LAIN HL : HUTAN LINDUNG HP : HUTAN PRODUKSI
 HPK : HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI HK : HUTAN KONSERVASI

PENURUNAN KUALITAS AIR



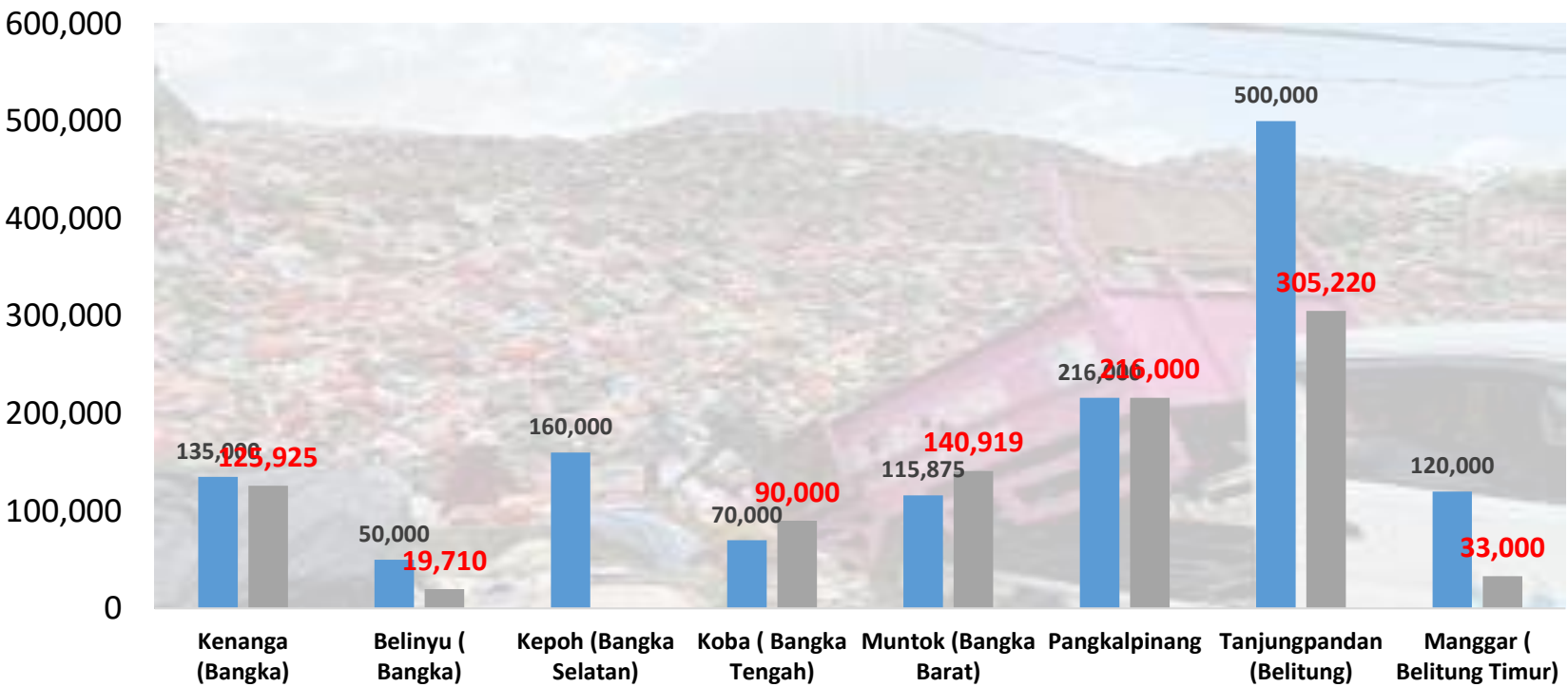
Indeks Kualitas Air Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Tren Data Tahun 2024 mengalami penurunan dari Tahun –Tahun sebelumnya

PENGOLAHAN SAMPAH BELUM OPTIMAL

Jumlah Timbunan Sampah
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

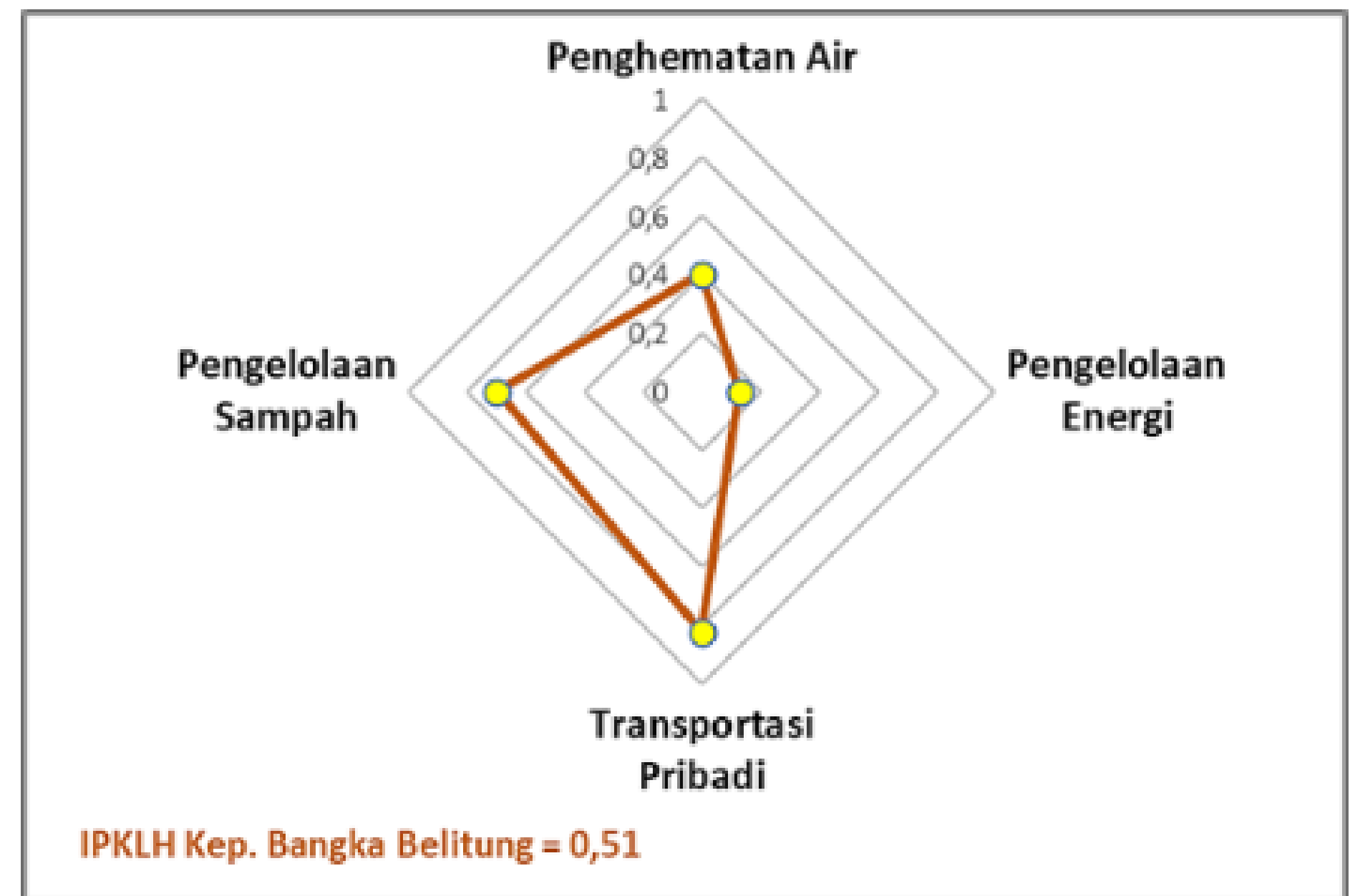
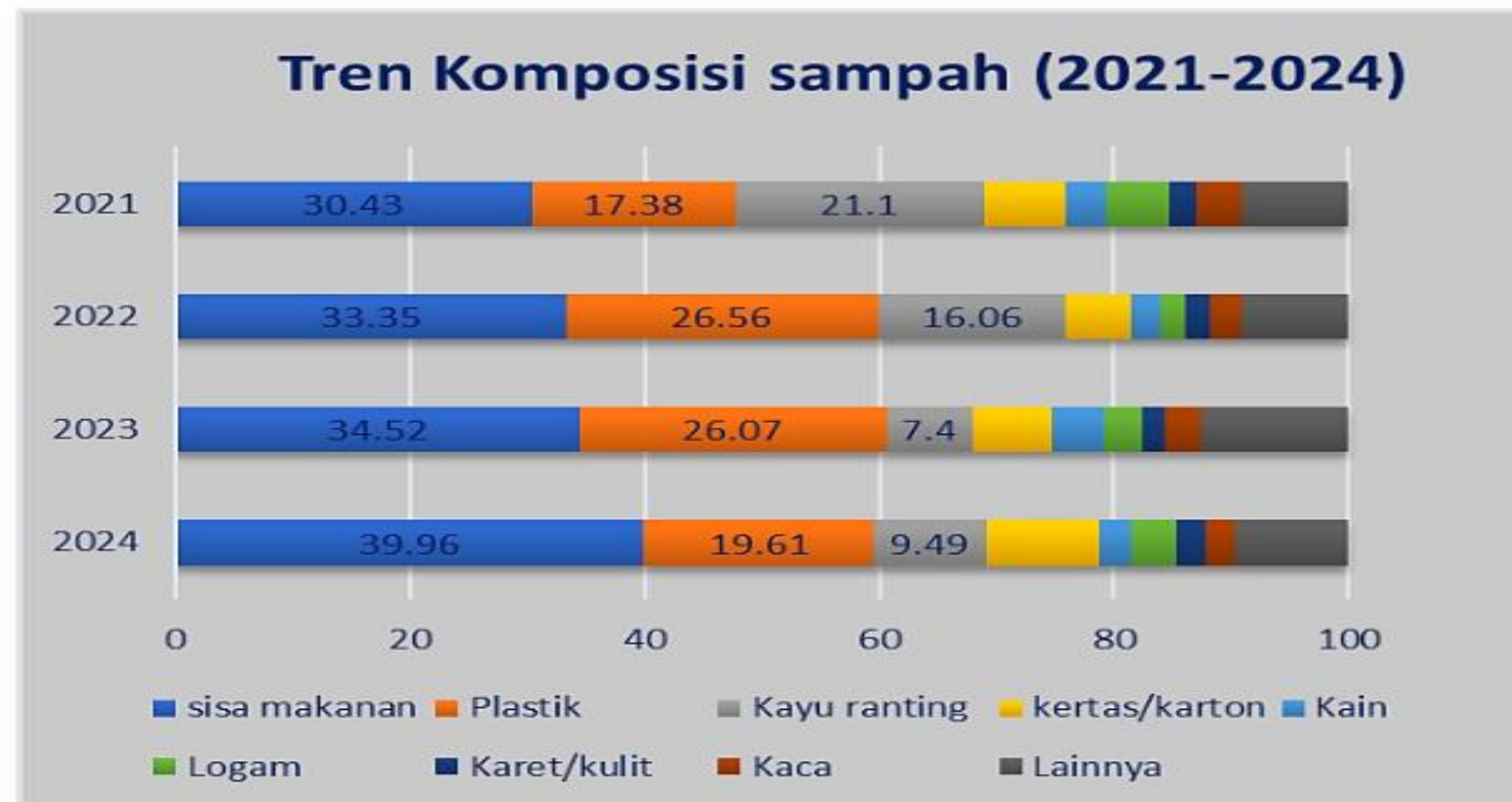
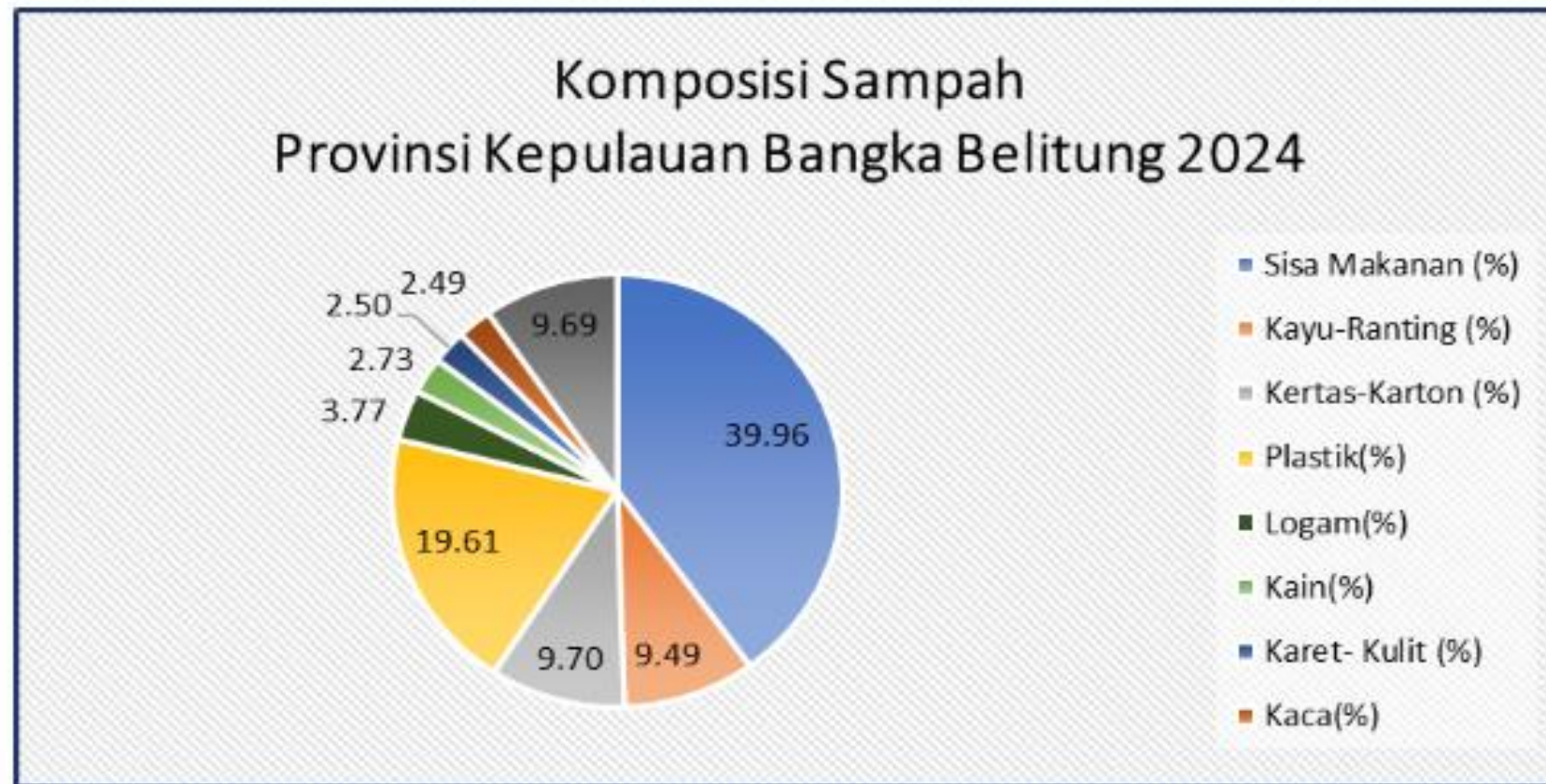
Kabupaten	Jumlah penduduk kabupaten	Jumlah Penduduk ibukota	Timbunan Sampah (m3/hari)		Persentase wilayah yang terlayani	
			Kabupaten	Ibukota kabupaten	Kabupaten	Ibukota kabupaten
Bangka	347.852	99.029	420	120	100	100
Bangka Tengah	210.608	35.246	343	58	99,56	99,74
Bangka Barat	214.428	55.445	259	67	15*	43,9*
Bangka Selatan	216.079	85.572	261	103	Tidak ada data	Tidak ada data
Pangkalpinang	-	239.730	-	507	-	100
Belitung	191.494	110.267	289	167	38,85	53,66
Belitung Timur	139.796	42.544	169	77	60,3	46,8

Kapasitas TPA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (m³)



Kapasitas TPA (m3) Kondisi Eksisting (m3)

PENGOLAHAN SAMPAH BELUM OPTIMAL

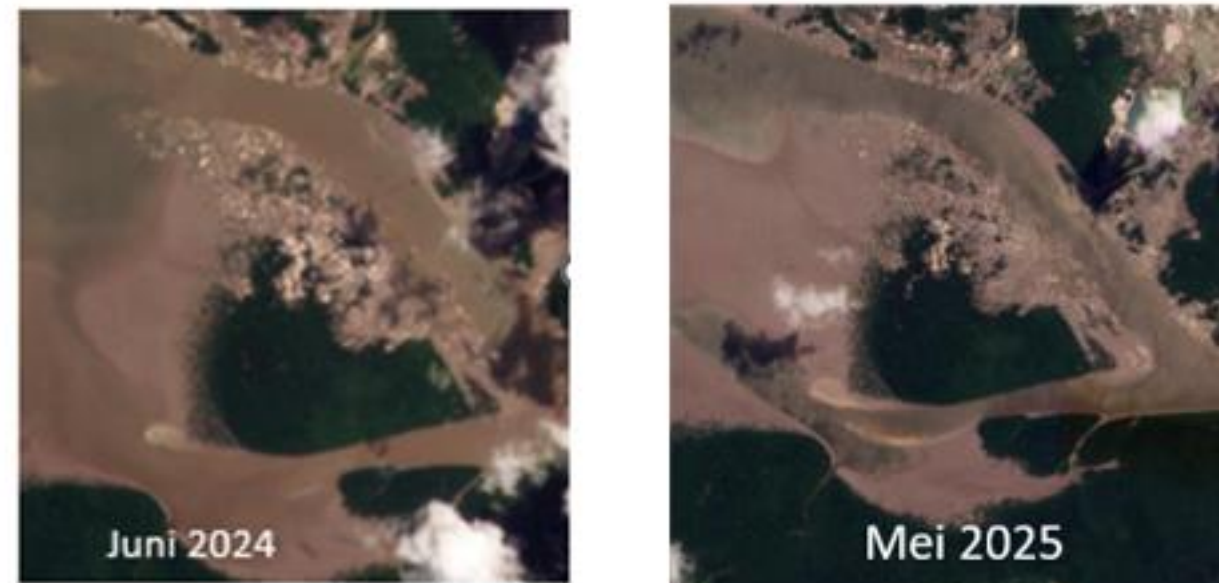


Berdasarkan Nilai Indikator Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup (IPKLH) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terlihat bahwa ketidakpedulian Masyarakat yaitu dimensi transportasi pribadi dan **pengelolaan sampah**

KERUSAKAN EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT



Kerusakan Hutan Mangrove terkait Aktivitas Tambak Udang Vaname
(Sumber: citra planetscope, Planetlabs)



Kerusakan Hutan Mangrove terkait Aktivitas
Penambangan DI Pulau Kayu Anak, Kabupaten Bangka
(Sumber: citra planetscope, Planetlabs)

- Alih fungsi lahan yang terjadi di wilayah pesisir berdampak pada menurunnya fungsi ekologis mangrove dan resiko perubahan iklim.
- Potensi sedimentasi yang cukup tinggi disebabkan oleh kegiatan pertambangan menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan terumbu karang.
- Investasi tambak udang yang massif
- Penurunan hasil tangkapan nelayan, jarak melaut nelayan yang semakin jauh karena kerusakan pesisir dan laut



PENUTUP



01

ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TERKAIT EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM SEPERTI DEGRADASI KERUSAKAN LAHAN, PENCEMARAN DAN DEGRADASI KUALITAS AIR, PENGELOLAAN SAMPAH YANG BELUM OPTIMAL, KERUSAKAN PESISIR DAN LAUT PERLU DIINTERVENSI DENGAN BERBAGAI KEBIJAKAN DAN MELIBATKAN BERBAGAI STAKEHOLDER SECARA LUAS

02

PELIBATAN BERBAGAI STAKEHOLDER DIPERLUKAN BAIK PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH, PELAKU USAHA, MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

03

KOMITMEN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG UNTUK MENJAGA FUNGSI-FUNGSI KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN TERUS DIOPTIMALKAN DENGAN BERBAGAI UPAYA MEREHABILITASI KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN MENGATUR PERBAIKAN TATA KELOLA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

04

DIPERLUKAN PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI DAERAH DARI SEKTOR EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM KEPADA SEKTOR- SEKTOR YANG LEBIH BERKELANJUTAN SERTA PENGEMBANGAN POTENSI PESISIR DAN LAUT , PARIWISATA DAN SEKTOR PENUNJANG LAINNYA

TERIMA KASIH

